



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERUBAHAN **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH** **(P-RKPD)** **KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

TAHUN
2025



BUPATI TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 Nomor 14) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 Nomor 14), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TAPANULI TENGAH,



MASINTON PASARIBU

Diundangkan di Pandan
pada tanggal ...Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



ERWIN HOTMANSAH HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN... NOMOR...

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1. Latar Belakang	I - 1
	1.2. Dasar Hukum	I - 2
	1.3. Hubungan antar Dokumen	I - 4
	1.4. Maksud dan Tujuan	I - 5
	1.5. Sistematika Dokumen	I - 6
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025.....	II - 1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	II - 1
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III - 1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
	3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional.....	III - 1
	3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	III - 2
	3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah	III - 4
	3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025	III - 11
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 13
	3.2.1 Arah kebijakan Pendapatan Daerah	III - 17
	3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III - 19
	3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III - 21
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV - 2
	4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	IV - 2
	4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	IV - 11
	4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	VI - 14
	4.4 Target Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025	VI - 31
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V - 1
BAB VI	PENUTUP	VI - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan I Tahun 2025	II - 1
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025	II - 3
Tabel 2.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025	II - 4
Tabel 2.4	Realisasi Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja OPD Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan I Tahun 2025	II - 16
Tabel 3.1	Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sampai Triwulan II 2024	III - 3
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha (%)	III - 5
Tabel 3.3	Distribusi Perekonomian menurut Lapangan Usaha.....	III - 6
Tabel 3.4	Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanulii Tengah Tahun 2024.....	III - 12
Tabel 3.5	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025	III - 14
Tabel 3.6	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025	III - 15
Tabel 3.7	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025.....	III - 16
Tabel 4.1	Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025	IV - 10
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	IV - 12
Tabel 4.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029	IV - 18
Tabel 4.4	Tahapan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah	IV - 27
Tabel 4.5	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tapanuli Tengah	IV - 28
Tabel 4.6	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.....	IV - 34
Tabel 5.1	Perubahan dan Sebelum Perubahan Pagu OPD	V - 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).....	III - 4
Gambar 3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus)	III - 7
Gambar 3.3	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin (Maret)	III - 8
Gambar 3.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-2)	III - 9
Gambar 3.5	Indeks Gini (Poin).....	III - 10
Gambar 3.6	Laju Inflasi Tahun 2019-2024	III - 11
Gambar 4.1	Gambaran Pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah	IV - 39
Gambar 4.2	Inovasi Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah	IV - 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2026. Namun, dalam pelaksanaannya, RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi serta ketentuan dan peraturan yang berlaku, di antaranya seperti terbitnya kebijakan/ regulasi baru yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kondisi nasional hingga daerah. Kebijakan/ regulasi baru yang diterbitkan pemerintah antara lain terkait regulasi tentang penetapan dana transfer berpengaruh terhadap perencanaan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Memperhatikan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pembangunan Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyusun Perubahan RKPD (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah serta menjadi

pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah NO. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik 7 Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.
31. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan dengan pola hubungan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang berpedoman pada Rancangan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2045;

2. Perubahan RKPD ini memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;
3. Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) yang selanjutnya untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan. Selain itu, dimaksudkan untuk dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia dalam pembangunan daerah.

Selanjutnya, perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah tahunan yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, serta kondisi dan perkembangan keadaan pada tahun berjalan.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk:

1. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 untuk pencapaian visi, misi dan program unggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, produktif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media (*pentahelix*);
4. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan;
5. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025.
6. Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2025.
7. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).
8. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.
9. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Platform Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025.

- 10. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- 11. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5 Sistematika Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini memuat tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen.
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN RKPD TW I TAHUN 2025
	Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 hingga Triwulan I serta permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi.
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
	Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam membangun perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAEARAH
	Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan.
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
	Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VI	PENUTUP
	Memuat kesimpulan dan penegasan bahwa diperlukan sinergitas bagi Pemerintah Daerah dan semua pihak terkait dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator makro pembangunan merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan per kapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan.

Indikator Makro Pembangunan Tahun 2024 - 2025 yang menjadi perhatian fokus dalam meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah. Analisa terhadap capaian indikator makro digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Realisasi capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.1
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan
Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	IPM	-	70,74- 71,14	73,34	71,11- 71,51	73,34
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,67- 11,67	11,80	10,33- 11,33	11,80
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,50	7,45	6,25	7,45
4	Indeks Gini	-	0,312	0,234	0,306	0,234

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,25-5,25	4,15	3,50-5,50	4,15
6	Laju Inflasi (Pendekatan Padang Sidempuan)	%	2		2	
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Juta Ton CO ₂ eq	2,75	-	3,00	-

Pada tahun 2025, terdapat 7 (tujuh) target indikator makro pembangunan yang telah ditetapkan, namun belum tersedia data realisasi hingga triwulan I tahun 2025, sehingga data realisasi yang digunakan merupakan data tahun 2024. Hal tersebut, dikarenakan beberapa indikator makro belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan I dan diukur secara tahunan atau belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik, sehingga belum dapat disajikan data capaiannya sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

2.1.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Hingga Triwulan I Tahun Tahun 2025

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain dapat dilihat melalui pengukuran pencapaian kinerja pembangunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP. Adapun Realisasi Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

No.	Indikator	Sat	Tahun 2023	Capaian	
				Tahun 2024	Tahun 2025 (Triwulan I)
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	72,77	73,34	73,34
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,23	4,15	4,15
3	PDRB per Kapita (Harga Berlaku)		32.6	34.6	34.6
4	Tingkat Kemiskinan	%	11,5	11,8	11,8
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,81	7,45	7,45
6	Indeks Gini	-	0,241	0,23	0,23
7	Indeks Reformasi Birokrasi	-	38,54	52,41	52,41
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	51,73	83,5	93,33

2.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Hingga Triwulan I Tahun 2025

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance*

Indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya hingga triwulan I Tahun 2025 dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Realisasi	Target	Realisasi
				2024	2025	Tw. I 2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	72,77	73,34	71,11-71,51	73,34
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,23	4,15	3,50-5,50	4,15
3	PDRB per Kapita		32,6	34,6	34,31	34,6
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	68,41	76,27	81,81	-
5	Tingkat Kemiskinan	%	11,5	11,8	10,33-11,33	11,8
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,81	7,45	6,25	7,45
	Indeks Gini	-	0,241	0,23	0,30	0,23
14	Indeks Reformasi Birokrasi	-	45,90		57,67 (CC)	
15	Nilai SAKIP	-	38,77 (C)	40,19	51,00 (CC)	40,19
16	Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention)	%	51,08	63,53		
17	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		73,033	79,059	65,634	-
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	51,73	83,5	60,00 (C)	93,33

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Realisasi	Target	Realisasi
				2024	2025	Tw. I 2025
19	Laju Inflasi (Kota Sibolga)	%	3,75	2,94	2	2,94
20	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Juta Ton CO2eq	-	-	3	Bukan indikator kinerja DLH
21	Prevalensi stunting	%	23,8			
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	63,56	63,60	87,59	63,60
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,98	99,98	99,67	99,98
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	99,10	99,18	87,76	99,18
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0,79	5,8	8,96	5,8
b) Kesehatan						
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	0,03	0,045	0,05	0,048
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	50	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	87,09	81,96	98,13	22,18
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	89,97	81,97	97,42	27,94
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	93,29	86,23	98,59	26,70
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	60,59	71,08	87,10	31,69

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Realisasi	Target	Realisasi
				2024	2025	Tw. I 2025
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	50,50	63,65	78,11	69,01
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	54,14	52,51	56,74	47,57
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	90,06	77,59	70,95	28,43
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	47,65	39,95	28,40	21,91
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	95,51	82,46	99,74	28,79
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	46,96	63,08	100	58,84
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	68,50	75,12	87,71	31,44
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	48,35	42,95	71,56	17,31
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	16	16	25	
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	73.54	74.00	68,12	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	61.78	61.13	68,14	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	43.75	42.81	99,08	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Realisasi	Target	Realisasi
				2024	2025	Tw. I 2025
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	88,92	
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	59.72	61.12	66,62	
7	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	
d) Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	0	0	100	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0	0	100	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	28,59	35,57	78,39	0
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	16,65	16,47	4	0
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	0,430	0,62	8,72	0
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	97	100	100
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75	75	85	75
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	-	350 Orang	500 Orang	0
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	-	350 Orang	500 Orang	0
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	-	800 Orang	1350 Orang	400 Orang
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Realisasi	Target	Realisasi
				2024	2025	Tw. I 2025
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
f) Sosial						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	75	100	24,45
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	91,4	100	10,64
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	26,32	27,73	58	16
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,50	0	0,90	0
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	27,52	4,21	48	0
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	2,2	6,6	4,4	0,02
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	2,8	2,13	8,33	0,188
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	11	28,22	10,90	0
2	Rasio anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (per 100.000 penduduk anak)	Angka	59,09	19,43	20,94	4,66
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO yang ditangani instansi terkait kabupaten (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	4,92	5,98	18,36	0,54

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Realisasi	Target	Realisasi
				2024	2025	Tw. I 2025
c) Pangan						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	0	0	2,20	0
d) Pertanahan						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0	0	100	0
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0	0	0	0
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	0	0	0	0
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	4	13,00	TIDAK ADA	0
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0	0	100	0
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	50	75	100	0
e) Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	68,41	76,27	81,81	0
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	22,629%	21,91 %	20%	6,2
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	0	0	10 %	0
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	perekaman KTP elektronik	%	91,46	94,42	100	
2	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	30,45	30,90	44	
3	kepemilikan akta kelahiran	%	49,04	50,81	100	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Realisasi	Target	Realisasi
				2024	2025	Tw. I 2025
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	%	15,15	24,24	36,49	
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase Pengentasan Desa sangat tertinggal dan tertinggal	%	57,86	41,51	49,05	
2	Persentase peningkatan status desa berkembang dan maju serta mandiri	%	42,14	58,48	50,59	
h) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,74	2,73	1,91	-
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	58,18	63,92	74,40	61,05
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	14,40	25,3	16,66	9,67
i) Perhubungan						
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	%	56	58	66	59
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	%	46	46	51	48
j) Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	6,0	6,3	28,0	6,5
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,0	95,	98,0	15,0
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	55,0	58,5	64,0	59,6
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	50,4	3,84	20	3,58
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	65	67	100	68

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Realisasi	Target	Realisasi
				2024	2025	Tw. I 2025
l) Penanaman Modal						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	148,53	99,95	19	33
m) Kepemudaan dan Olahraga						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,79	1,74	2	1,73
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	2,12	2,06	7	2,04
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	-	2	2	NIHIL
n) Statistik						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	20,0
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	96,0	98	15,0
o) Persandian						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100,0	55,0	20,0	8,0
p) Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100
q) Perpustakaan						
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	42,50	55,43	45,50	9,8
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	30,00	34,23	33	8,25
r) Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	3,13	3,75	4,38	Nihil
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek	%	1,19	1,14	1,73	Nihil

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Realisasi	Target	Realisasi
				2024	2025	Tw. I 2025
	kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
Urusan Pilihan						
a) Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: <i>one data</i> KKP)	Ton	42.307	41.504	52.692	9.209
b) Pariwisata						
1	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	36	44	36	No Data
2	Persentase kunjungan wisatawan nusantara	persen	21,39	19,22	7,5	No Data
3	Tingkat hunian akomodasi	%	49,72	49,05	58,37	No Data
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	10,25	4,85	0,87	No Data
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	35,38	84,20	3	7,2
c) Pertanian						
1	Persentase peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	7,24	2,39	2,35	2,14
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-100	-100	100	250
d) Kehutanan						
e) Energi dan Sumber Daya Mineral						
f) Perdagangan						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	0		0,92	0
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	81	91	100	32
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	45,81		22,38	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Realisasi	Target	Realisasi
				2024	2025	Tw. I 2025
g) Perindustrian						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	3,13	2,63	13,33	65
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	37,5	40,29	47,5	0
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	0,010	100	0
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	78	0
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	0	0	100	0
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	50	99	50
h) Transmigrasi						
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
a) Perencanaan dan Keuangan						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	13	50,30	14,57	40,27
2	Rasio PAD	%	7	7,41	10,50	9
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	Level 2,7	2,737	Level 3	-
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	Level 1	2,60	Level 3	-
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	%	83	-0,137	32,5	0,29
6	Opini Laporan Keuangan	-	WDP	WDP	WTP	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Realisasi	Target	Realisasi
				2024	2025	Tw. I 2025
b) Pengadaan						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	1,85	1,20	1,4	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	16,20	62,47	80	0,22
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	27,74	45,28	70	0,22
c) Kepegawaian						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	75	70,42	446	75,37
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	12	17,32	64	17,32
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	10,17	7,55	2	7,55
d) Manajemen Keuangan						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	6	6,43	12	74,46
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	14	0,48	28,50	6,59
3	Manajemen Aset	-	ADA	ADA	ADA	ADA
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya
	3. Apakah ada proses invcntarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	6	5,66	6	5,75
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
I.	Kemampuan Ekonomi Daerah					

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Realisasi	Target	Realisasi
				2024	2025	Tw. I 2025
1	Pangan					
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	NIHIL	NIHIL	1.050.000	NIHIL
01.02	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp	NIHIL	NIHIL	440.000	NIHIL
2	Pertanian					
02.01	Nilai Tukar Petani (Pendekatan angka Provinsi)	-	121,81	146,97	101	144,99
II	Iklim Berinvestasi					
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat					
01.01	Angka kriminalitas (crime rate)	%	-	-	45	-
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
02.01	Nilai Indeks Desa Membangun	-	0,5842 (Tertinggal)		0,5947 (Tertinggal)	
III	Sumber Daya Manusia					
1	Ketenagakerjaan					
01.02	Persentase penduduk berpendidikan tinggi	%	11,33	11,74	11	2,93

2.1.4. Evaluasi Berdasarkan Kinerja dan Anggaran

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 305 ayat (1) menyatakan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup daerah kabupaten/kota. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten/kota dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD kabupaten/kota.

Dalam rangka memberikan dorongan serta optimalisasi pembangunan daerah, pengukuran kinerja pembangunan juga dilakukan terhadap Capaian Kinerja per Urusan Pemerintahan Daerah berupa indikator keluaran (output) pada program Perangkat Daerah. Rata-rata persentase capaian kinerja program akan dinilai berdasarkan kriteria pada Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berikut disajikan rekapitulasi data dimaksud.

Tabel II.4
Realisasi Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja OPD
Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan I Tahun 2025

NO.	URUSAN	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA
I. Wajib Pelayanan Dasar			
1.	Pendidikan Kesehatan	12%	Sangat Rendah
2.	Dinas Kesehatan RSUD Pandan	11%	Sangat Rendah
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3%	Sangat Rendah
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	13%	Sangat Rendah
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
	Satpol PP	17%	Sangat Rendah
	BPBD	14%	Sangat Rendah
II. Wajib Non Pelayanan Dasar			
6.	Sosial	11%	Sangat Rendah
7.	Tenaga Kerja	16%	Sangat Rendah
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1%	Sangat Rendah
9.	Pangan		Sangat Rendah
10.	Lingkungan Hidup	7%	Sangat Rendah
11.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8%	Sangat Rendah
12.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3%	Sangat Rendah
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Sangat Rendah

NO.	URUSAN	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA
14.	Perhubungan	17%	Sangat Rendah
15.	Komunikasi dan Informatika	10%	Sangat Rendah
16.	Koperasi dan UKM	2%	Sangat Rendah
17.	Penanaman Modal		Sangat Rendah
18.	Kepemudaan dan Olahraga	22%	Sangat Rendah
19.	Perpustakaan	1%	Rendah
III. Pilihan			
20.	Kelautan dan Perikanan	19%	Sangat Rendah
21.	Pariwisata	9%	Rendah
22.	Pertanian	4%	Sangat Rendah
23.	Perindustrian dan Perdagangan		Sangat Rendah
IV. Fungsi Penunjang			
	Administrasi Pemerintahan		
24.	Sekretariat Daerah Kabupaten	19%	Sangat Rendah
	Sekretariat Dewan	8%	Sangat Rendah
25.	Pengawasan	2%	Sangat Rendah
26.	Perencanaan	9%	Sangat Rendah
27.	Pengelolaan Keuangan	1%	Sangat Rendah
28.	Kepegawaian	7%	Sangat Rendah
V. Urusan Pendukung			
29.	Kesbangpol		Sangat Rendah

Hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 mempunyai total rata-rata capaian kinerja dan anggaran sebesar 9% dengan predikat Sangat Rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian belum memenuhi persyaratan pencapaian kinerja yang diharapkan dikarenakan masih banyak kegiatan yang belum bisa dilaksanakan di triwulan pertama.

2.1.5. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain, sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk menggunakan anggaran secara efisien, efektif dan produktif;
2. Dukungan peraturan perundang-undangan dan pendampingan dari pemerintah atasan (pusat dan provinsi) dalam rangka pencapaian kinerja;
3. Teknologi informasi yang memudahkan pelayanan dan memfasilitasi koordinasi antar perangkat daerah dan lintas perangkat daerah;
4. Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja. Serta adanya komitmen dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah;
5. Adanya rencana program yang rinci mencakup tujuan, jadwal, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan;
6. Kondisi eksternal yang mendukung yakni adanya partisipasi masyarakat, faktor iklim, kondisi pasar dan adaptif dengan perubahan;
7. Adanya komitmen tim pelaksana kegiatan serta tim yang kompeten dan terlatih.

2.1.6. Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain:

1. Kurangnya sumber daya aparatur yang memadai dalam peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
2. Keterbatasan anggaran serta capaian realiasi pendapatan yang belum sesuai dengan perencanaan;
3. Penggunaan dana untuk membiayai tenaga PPPK;
4. Masih adanya beberapa Perangkat Daerah yang mengalami keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan dan pelaporan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan.
5. Dinamika peraturan yang begitu cepat.

2.1.7. Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan hasil dan kesimpulan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 Triwulan I, maka dapat diambil beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan RKPD tahun berjalan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi/IT, internet, untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi dan upgrade pengetahuan guna pencapaian kinerja serta mengupayakan integrasi antar aplikasi untuk memudahkan pengelolaan data base dan menghindari duplikasi dan kesalahan dalam penginputan data;
2. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan;
3. Rasionalisasi belanja agar efisien, efektif dan produktif;
4. Pengintegrasian aplikasi yang ada sehingga dapat memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
5. Peningkatan kualitas aparatur, sarana dan prasarana untuk pencapaian kinerja;
6. Akselerasi/percepatan proses pengadaan barang dan jasa untuk mengantisipasi permasalahan dalam lelang/pengadaan barang dan jasa;
7. Peningkatan komitmen dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah;
8. Melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pada perangkat daerah;
9. Peningkatan komunikasi yang efektif dengan pihak yang terlibat dalam program sehingga koordinasi menjadi lebih baik dan efektif;
10. Pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu yang merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan lainnya.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional

Kondisi ekonomi Nasional tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun juga dihadapkan pada tantangan global. Pada kuartal pertama 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh konsumsi rumah tangga. Meskipun demikian, ada proyeksi bahwa pertumbuhan ini bisa melambat menjadi di bawah 5% akibat ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi negara maju.

Beberapa poin penting mengenai kondisi ekonomi nasional tahun 2025:

- **Pertumbuhan Ekonomi:**
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 mencapai 4,87% (yoy), menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah tantangan global.
- **Konsumsi Rumah Tangga:**
Konsumsi rumah tangga menjadi kontributor terbesar terhadap PDB, dengan pangsa sebesar 54,5%.
- **Tantangan Global:**
Ketidakpastian global akibat perang dagang dan perlambatan ekonomi negara maju menjadi tantangan yang perlu diatasi.
- **Peluang:**
Pemerintah berupaya memperkuat ketahanan ekonomi domestik dan menjalin kerjasama internasional untuk mengurangi risiko global.
- **Proyeksi Pertumbuhan:**
Beberapa lembaga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 akan berada di bawah 5%.
- **Perlambatan:**

Ada indikasi perlambatan ekonomi, terutama pada triwulan pertama, yang mungkin disebabkan oleh faktor domestik dan ketidakpastian global yang sudah ada sebelumnya, bukan hanya karena perang dagang.

- Faktor Lain:
Pergerakan nilai tukar rupiah dan aliran investasi ke dalam negeri juga menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas makro ekonomi.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun tetap perlu mewaspadai tantangan global dan berupaya menjaga stabilitas domestik.

3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Kondisi ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,67% dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024 (year-on-year). Namun, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (triwulan IV tahun 2024), ekonomi Sumatera Utara mengalami kontraksi sebesar 0,99% (quarter-on-quarter). Secara umum, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2025 diprediksi akan semakin kuat, dengan perkiraan mencapai 4,9-5,7% (yoy).

Beberapa poin penting terkait ekonomi Sumatera Utara tahun 2025:

- Pertumbuhan Triwulan I:
Pertumbuhan 4,67% (yoy) menunjukkan adanya ekspansi ekonomi, namun kontraksi (q-to-q) mengindikasikan adanya fluktuasi antar triwulan.
Ekonomi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2025 terhadap Triwulan I Tahun 2024 tumbuh sebesar 4,67 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,13 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,69 persen.
Ekonomi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2025 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,99 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,01 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,62 persen.
- Inflasi
Pada Mei 2025, inflasi year-on-year (y-on-y) di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,11 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar

108,29. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 3,18 persen dengan IHK sebesar 109,26, sedangkan inflasi y-on-y yang terendah terjadi di Kabupaten Karo sebesar 0,41 persen dengan IHK sebesar 108,49.

Tingkat deflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,49 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 0,97 persen

- **Ekspor dan Impor**
Ekspor Sumatera Utara pada April 2025 mencapai US\$ 869,97 Juta dan Impor Sumatera Utara pada April 2025 mencapai US\$ 443,33 Juta.
- **Prediksi Pertumbuhan**
Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2025 akan mencapai 4,9-5,7% (yoy).
- **Nilai Tukat Petani (NTP)**
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara didukung oleh berbagai sektor, termasuk perkebunan, industri, dan pariwisata.
Pada Mei 2025, NTP Provinsi Sumatera Utara (2018=100) tercatat sebesar 139,53 atau turun 1,17 persen dibandingkan dengan NTP April 2025, yaitu sebesar 141,18.
Penurunan NTP Mei 2025 disebabkan oleh turunnya NTP dua subsektor, yaitu NTP subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 5,76 persen dan NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,96 persen. Sementara itu, NTP tiga subsektor lainnya mengalami kenaikan, yaitu NTP subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,56 persen, NTP subsektor Peternakan sebesar 1,01 persen, dan NTP subsektor Perikanan sebesar 0,27 persen.
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Sumatera Utara pada Mei 2025 sebesar 140,20 atau turun sebesar 1,61 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 - 2024

Lapangan Usaha	Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.95	3.87	5.03	3.04	3.73
b. Pertambangan dan Penggalian	-2.31	1.92	2.62	3.53	4.03
c. Industri Pengolahan	-0.84	1.43	1.98	3.42	4.65
d. Pengadaan Listrik dan Gas	3.16	4.93	4.81	2.17	2.66
e. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah dan limbah.	3.79	3.62	2.17	2.87	2.57

f. Kontruksi	-3.42	2.18	3.03	6.4	6.52
g. Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	-1.87	3.62	6.57	5.8	4.44
h. Transportasi dan Pergudangan	-12.77	-3.63	12.96	13.12	6.33
i. Akomodasi dan Makan Minum	-9.26	-0.81	7.26	10.23	11.98
j. Informasi dan Komunikasi	6.17	6.51	7.6	7.81	7.41
k. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.29	4.46	3.81	5.5	3.87
l. Real Estate	1.57	2.5	4.53	3.19	5.41
m. n. Jasa Perusahaan	-4.71	-0.14	8.78	6.69	5.12
o. Adm pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	0.37	2.08	-0.73	1.92	6.08
p. Jasa pendidikan	1.52	3.05	5.14	7.38	5.66
q. Jasa Kegiatan sosial, dan	-2.46	0.25	4.83	6.44	5.12
r. s.t.u. Jasa Lainnya	-3.74	1.43	8.72	9.47	6.54

Sumber data : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada Tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan laju pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 11,98 %. Padahal sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 13,12 % dan pada Tahun 2024 laju pertumbuhannya sebesar 6,33 % mengalami penurunan sebesar 6,79 %.

Untuk sektor ekonomi Informasi dan Komunikasi merupakan sektor ekonomi dengan laju pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 7,41 % walaupun mengalami penurunan laju pertumbuhan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 7,81 %.

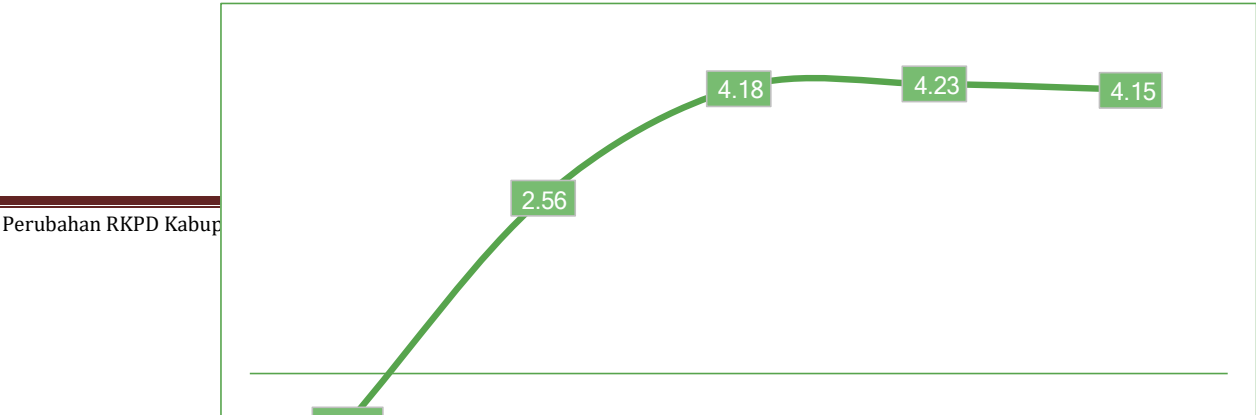
Sedangkan sektor ekonomi dengan laju pertumbuhan terendah yaitu sektor Pengadaan Air, Pengelolaan sampah dan limbah yaitu sebesar 2,57 %.

3.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah

3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro yang menggambarkan peningkatan ekonomi daerah diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kontraksi sebesar 0,76 persen akibat krisis global pandemi Covid-19, namun secara perlahan kembali pulih. Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 2,56 % dan pada Tahun 2022 sebesar 4,18 % hingga tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah mencapai 4,23 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemulihan ekonomi sehingga Kabupaten Tapanuli Tengah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya secara bertahap. Namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,15 persen. Untuk Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 5,72 % lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebesar 4,67. Secara spesifik, laju pertumbuhan ekonomi menurut sektor dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 - 2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02	2,34	4,06	3,21	2,61
Pertambangan dan Penggalian	-2,28	5,14	5,03	5,18	0,53
Industri Pengolahan	-2,78	4,13	1,87	4,04	4,23
Pengadaan Listrik dan Gas	0,84	3,53	4,74	1,89	5,56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	0,54	7,74	3,71	4,40
Konstruksi	-5,12	-	3,01	5,21	7,16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,53	5,73	7,91	5,59	5,11
Transportasi dan Pergudangan	-7,13	-9,82	11,77	12,64	2,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,61	1,03	-	7,85	6,90

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Informasi dan Komunikasi	7,15	7,73	7,48	5,06	4,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	6,25	4,36	4,47	4,29
Real Estat	1,29	0,92	5,70	5,45	3,61
Jasa Perusahaan	-1,77	0,95	7,19	-	7,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,74	-0,58	-0,02	3,48	7,99
Jasa Pendidikan	0,04	4,46	-	6,75	5,25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,22	-0,93	5,92	6,41	6,00
Jasa lainnya	-1,34	2,98	6,33	7,82	8,59
Produk Domestik Regional Bruto	-0,76	2,56	4,18	4,23	4,15

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal pada Sektor Jasa Lainnya sebesar 8,59 persen, kemudian Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,99 persen, dan Sektor Jasa Perusahaan sebesar 7,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut memiliki prospek ke depannya untuk meningkatkan perekonomian daerah.

3.1.3.2. Distribusi Perekonomian

Distribusi Perekonomian dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dari masing-masing lapangan usaha. Dengan melihat distribusi perekonomian, maka akan diperoleh gambaran sektor mana yang paling berperan bagi perekonomian daerah. Distribusi perekonomian menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Distribusi Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 – 2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46,18	46,20	46,76	46,80	47.02
Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,26	0,26	0,26	0.24
Industri Pengolahan	11,18	11,61	11,60	11,25	11.26
Pengadaan Listrik dan Gas	0,57	0,56	0,56	0,53	0.51
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0.12
Konstruksi	11,55	11,74	11,70	12,00	12.13
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,29	12,50	12,57	12,55	12.42
Transportasi dan Pergudangan	2,56	2,18	2,41	2,74	2.66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,37	1,33	1,33	1,32	1.33
Informasi dan Komunikasi	0,64	0,67	0,66	0,65	0.63
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,98	1,03	0,99	0,96	0.9

Real Estat	2,06	2,03	1,98	1,94	1.86
Jasa Perusahaan	0,33	0,33	0,33	0,34	0.33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,50	8,06	7,36	7,20	7.26
Jasa Pendidikan	0,98	0,98	0,95	0,93	0.92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,35	0,33	0,33	0,33	0.33
Jasa lainnya	0,09	0,09	0,09	0,09	0.09
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

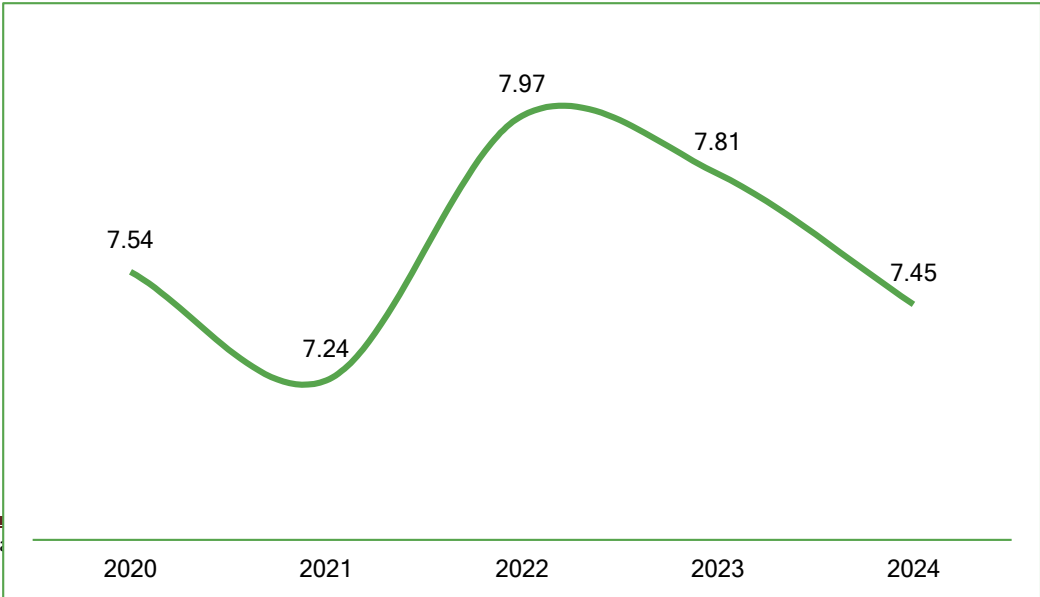
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tahun 2024, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana pada tahun 2024 kontribusi sektor ini sebesar 47,02 persen, kemudian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,42 persen, Sektor Konstruksi sebesar 12,13 persen, dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 11,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keempat sektor tersebut merupakan sektor basis yang menjadi penopang perekonomian daerah. Sektor tersebut harus terus ditingkatkan karena berperan penting bagi perekonomian daerah

3.1.3.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja/sedang mencari kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator makro yang menggambarkan kondisi pengangguran di suatu daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja (15-64 tahun) yang tidak/belum/sedang mencari pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka dapat berdampak buruk bagi perkembangan ekonomi daerah. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

Gambar 3.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2020-2024



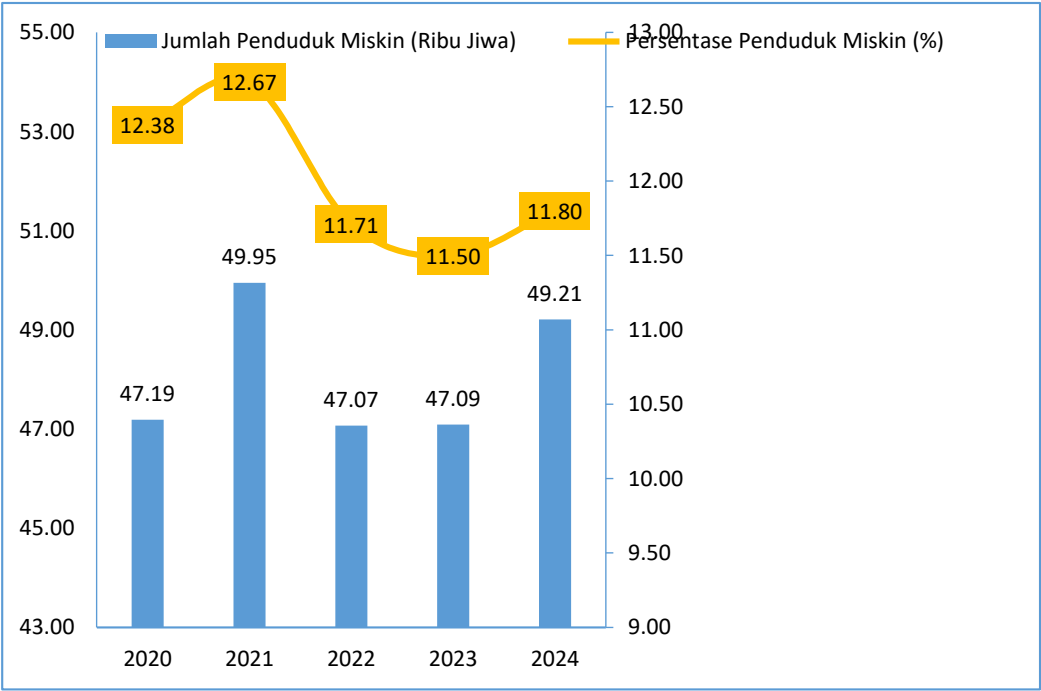
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Tengah cenderung meningkat dari 7,54 persen pada tahun 2020 menjadi 7,97 persen pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 7,45 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, namun hal ini masih menunjukkan bahwa masih banyak angkatan kerja yang menganggur di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia atau tenaga kerja yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Maka dari itu, hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja.

3.1.3.4. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.3
Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

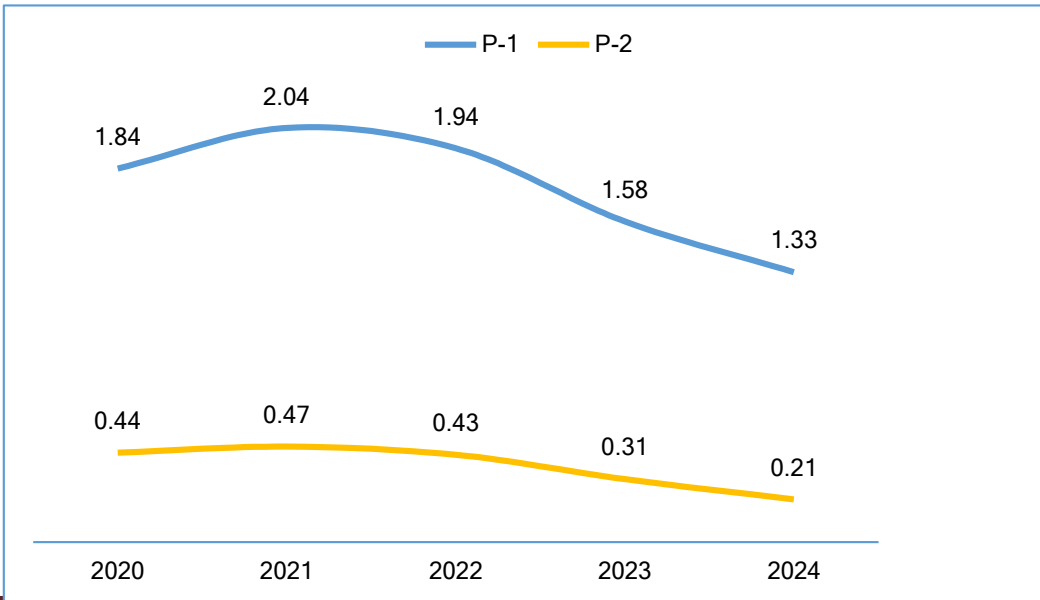
Persentase penduduk miskin relatif menurun dari 12,38 persen pada tahun 2020 mn menjadi 11,80 persen pada tahun 2024. Namun,

capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2023. Begitu juga dengan jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat dari 47,19 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi sebanyak 49,21 ribu jiwa pada tahun 2024. Jika dibandingkan secara persentase penduduk miskin pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, sebaliknya jumlah penduduk miskin lebih rendah pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2024. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah juga meningkat sehingga persentasenya lebih kecil dibandingkan tahun 2020.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) atau *Poverty Gap Index* merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks ini menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P-1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai P-1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P-2) atau *Poverty Severity Index* memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P-2, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-2) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024



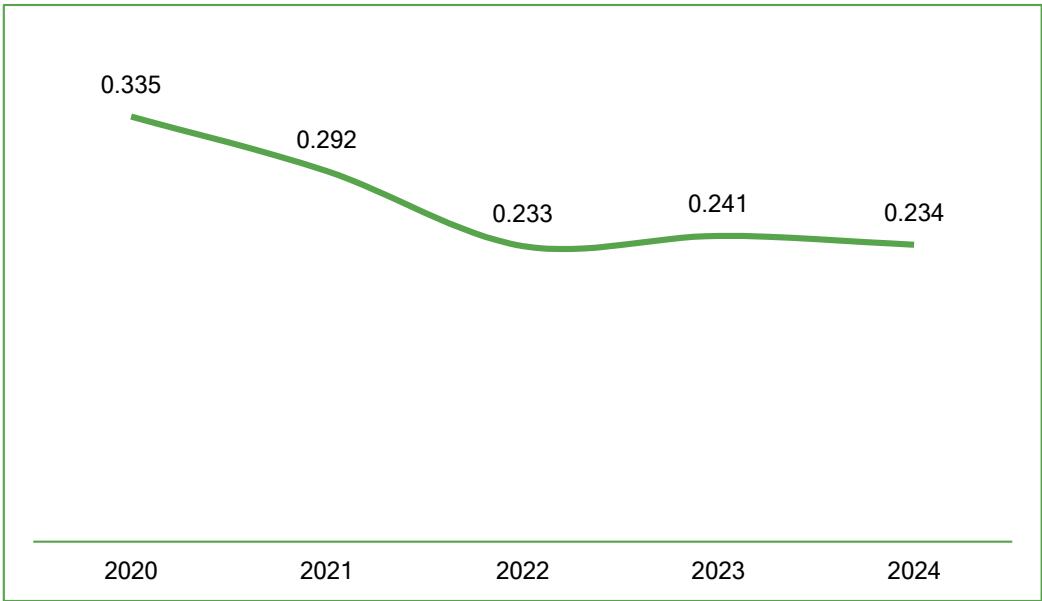
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Kedua indeks mengalami pergerakan yang relatif sama, di mana mengalami penurunan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) meningkat dari 1,84 persen pada tahun 2020 menjadi 2,04 persen pada tahun 2021 dan menurun hingga tahun 2024 menjadi 1,33 persen, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P-2) mengalami peningkatan dari 0,44 persen pada tahun 2020 menjadi 0,47 persen pada tahun 2021 dan menurun hingga tahun 2020 menjadi 0,21 persen. Hal ini menggambarkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah semakin baik dalam mengatasi permasalahan, namun pemerintah tetap harus terus mengurangi penduduk miskin melalui identifikasi permasalahan kemiskinan dan bantuan yang tepat.

3.1.3.5. Rasio Gini

Indeks Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan/kekayaan yang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan absolut (satu orang menguasai semua pendapatan/kekayaan)

Gambar 3.5
Indeks Gini Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Indeks Gini Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan dari 0,335 poin pada tahun 2020 menjadi 0,234 poin pada

tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin rendah. Namun, perlu diperhatikan apakah indeks yang semakin menurun ini menunjukkan semakin menurunnya pendapatan masyarakat sehingga mendekati masyarakat yang berpendapatan rendah atau sebaliknya.

3.1.3.6. Inflasi

Secara umum laju inflasi merupakan persentase kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu priode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi adalah permintaan dan penawaran barang, biaya produksi, kebijakan moneter, dan perubahan nilai tukar mata uang. Pendekatan laju inflasi Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan laju inflasi di Kota Sibolga. Pada kurun waktu 2020-2024 secara umum laju inflasi Kota Sibolga mengalami penurunan. Meskipun terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2022 sebesar 6,43 persen, namun pada 2023 pemerintahan berhasil menekan laju inflasi menjadi 2,80 persen. Pada Tahun 2024 laju inflasi Kota Sibolga sebesar 2,94 persen mengalami kenaikan dari tahun 2023. Kenaikan laju inflasi akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kebutuhan bahan makanan menjadi penyumbang terbesar yang mempengaruhi tingkat laju inflasi di kota sibolga dan sekitarnya.

Gambar 3.6
Laju Inflasi Tahun 2020-2024



Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Laju inflasi Kota Sibolga bila dilihat rata-rata berada diatas laju inflasi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Peningkatan inflasi

tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal saja, tetapi juga Nasional dan global.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

3.1.4.1. Tantangan

Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global sehingga diperlukan pemulihan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 sehingga tantangan yang dihadapi antara lain :

1. Pengendalian inflasi
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan/ mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial dan strategis
3. Mendorong investasi yang berwawasan lingkungan
4. Penguatan Koperasi dan UMKM serta pelaku-pelaku usaha pada sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis seperti pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan.
5. Peningkatan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar global;
6. Penghapusan kemiskinan ekstrim
7. Penurunan stunting
8. Peningkatan pelayanan sektor pendidikan dan kesehatan
9. Peningkatan kondisi infrastruktur; dan
10. Peningkatan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

3.1.4.2. Prospek Perekonomian Daerah

Secara Nasional pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2024 akan lebih baik dari tahun 2023 hal ini dapat dilihat dari target pertumbuhan tahun 2024 sebesar 5,3%-5,7% , lebih tinggi dari target tahun ini sebesar 5,3%.

Secara umum, Prospek Perekonomian Daerah Tapanuli Tengah tahun 2024 adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan inovasi daerah. Pengembangan inovasi didorong untuk pemanfaatan

- teknologi tepat guna yang secara langsung dapat diaplikasikan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat; dan
2. Pemulihan daya saing ekonomi. Kebijakan pemulihan daya saing ekonomi diarahkan untuk mengakselerasi tiga lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar Tapanuli Tengah. Strategi yang perlu ditempuh adalah melalui peningkatan investasi, penyiapan tenaga kerja berkualitas, pembangunan infrastruktur penunjang, pencetakan wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pencapaian target idikator Kinerja makro tahun 2024;

Tabel 3.4
Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi	Target	Capaian Kinerja
				2023	2024	TW II 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,18	4,23	4,25-5,25	4,23
2	Laju Inflasi	%	6,43	3,75	2	3,75
3	Indeks Gini	Point	0.233	0,241	0,212	0,241
4	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	indeks	70,31	72,77	70,74-71,14	72,77
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,97	7,81	6,50	7,81
6	Tingkat Kemiskinan	%	11,71	11,50	10,67 – 11,67	11,50
7	PDRB Perkapita	Rp	31,05	32,649	32,96	32,649

Laju pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun awal sebesar 4,23. Sektor penyumbang PDRB tertinggi yakni Pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kontruksi serta industri pengolahan. Laju inflasi juga mengalami penurunan angka yang dimana pada tahun 2022 sebesar 6,43 persen, menurun menjadi 3,75 persen dan pada Triwulan II 2024 masih stabil pada angka 3,75 persen. Secara keseluruhan indikator kinerja makro Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan kontribusi positif untuk pengembangan wilayah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Dana Desa dari APBN; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan Dana insentif daerah. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.

Untuk mendukung terwujudnya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, arah kebijakan yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
2. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Optimalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha BUMD agar memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil.
6. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya.
7. Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain. Pendapatan dari Bagi Hasil dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan aktivitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah.

Selanjutnya realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		RKPD 2025	APBD INDUK 2025	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6 = (5 - 3)
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	82.805.789.000,00	82.805.789.000,00	82.805.789.000,00	0,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	26.957.938.000,00	26.957.938.000,00	26.957.938.000,00	0,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.090.000.000,00	2.090.000.000,00	2.090.000.000,00	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.790.167.000,00	10.790.167.000,00	10.790.167.000,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.967.684.000,00	42.967.684.000,00	42.967.684.000,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.163.733.203.012,00	1.117.099.129.000,00	1.071.776.237.317,00	-45.322.891.683,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.104.333.203.012,00	1.057.699.129.000,00	1.003.785.554.000,00	-53.913.575.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.400.000.000,00	59.400.000.000,00	67.990.683.317,00	8.590.683.317,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAMA	23.345.588.108,00	23.345.588.108,00	23.345.588.108,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah				
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.345.588.108,00	23.345.588.108,00	23.345.588.108,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.269.884.580.120,00	1.223.250.506.108,00	1.177.927.614.425,00	-45.322.891.683,00

Pendapatan Daerah diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp.45.322.891.683,00 dari Rp1.223.250.506.108,00 menjadi Rp1.177.927.614.425,00 dengan komponen penurunan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Rp.29.353.616.000,00 DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Rp. 19.863.218.000,00 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan Rp. 4.696.741.000,00

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah secara umum antara lain :

- 1. Belanja wajib dan mengikat.
- 2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 3. Belanja pendidikan, kesehatan dan infrastrukutr
- 4. Belanja peningkatan pertumbuhan ekonomi
- 5. Belanja pemilukada, pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting.

6. Belanja dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;.
7. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintahan Desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan DAU, DAK dan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
10. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2022 yaitu Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Pengembangan Sentra-Sentra Ekonomi, Pengembangan Perekonomian Desa/Kelurahan, Peningkatan Pelayanan Publik, dan Peningkatan Kerjasama Daerah.
11. Mendukung program/kegiatan strategis dan prioritas yang terkait dengan agenda nasional dan provinsi sesuai dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Selanjutnya realisasi dan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		RKPD 2025	APBD INDUK 2025	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6 = (5 - 3)
5	BELANJA DAERAH				
5.1	Belanja Operasi	881.246.394.191,00	890.892.143.006,40	880.055.685.225,50	-1.190.708.965,50
5.1.01	Belanja Pegawai	519.621.348.050,00	528.542.438.969,00	529.437.964.880,00	9.816.616.830,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.310.847.522,00	343.897.535.418,40	332.365.551.726,50	-11.945.295.795,50
5.1.03	Belanja Bunga	3.108.426.269,00	3.108.426.269,00	3.108.426.269,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	14.205.772.350,00	15.343.742.350,00	15.143.742.350,00	937.970.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
5.2	Belanja Modal	180.033.896.752,00	123.417.417.758,59	115.044.098.690,40	-64.989.798.061,60
	Belanja Tanah	0	0	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.269.834.028,00	25.277.178.033,40	31.596.618.570,40	-11.673.215.457,60
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.745.936.664,00	51.428.155.498,19	58.354.703.485,00	4.608.766.821,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.342.208.069,00	43.291.604.227,00	18.954.299.384,00	-58.387.908.685,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.675.917.991,00	3.420.480.000,00	3.838.477.251,00	-1.837.440.740,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	200.000.000,00	200.000.000,00

Pada tabel diatas belanja juga mengalami penurunan sebesar Rp. 19.673.270.524,00 yang terdiri dari belanja Operasi menurun sebesar Rp. 10.836.457.780,9 dan Belanja Modal menurun sebesar Rp. 8.373.319.068,19 .

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang akan digunakan untuk menutupi defisit.

Penerimaan pembiayaan Tapanuli Tengah Pada APBD Induk TA. 2025 diasumsikan sebesar Rp 30.740.304.496,00 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2025 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah menurun sebesar Rp 3.500.000.000,00. adapun Rincian Pembiayaan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		RKPD 2025	APBD INDUK 2025	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6 = (5 - 3)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	17.310.021.000,00	17.310.021.000,00	48.050.325.496,00	30.740.304.496,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.310.021.000,00	17.310.021.000,00	48.050.325.496,00	30.740.304.496,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah				
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.310.021.000,00	17.310.021.000,00	48.050.325.496,00	30.740.304.496,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.152.846.124,00	14.152.846.124,00	10.652.846.124,00	-3.500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0	-3.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.152.846.124,00	14.152.846.124,00	10.652.846.124,00	-3.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	3.157.174.876,00	3.157.174.876,00	37.397.479.372,00	34.240.304.496,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN 2025	-			

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan yang baik mempunyai sasaran dan prioritas yang jelas untuk periode waktu tertentu. Sasaran pada dasarnya merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan. Dalam melaksanakan pembangunan, tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing wilayah dan daerah mempunyai keterbatasan, baik dari pendanaan, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain. Oleh karena itu dalam setiap rencana pembangunan perlu ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan.

Sasaran dan prioritas pembangunan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Prioritas dan sasaran pembangunan juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sebagai satu kesatuan Negara Republik Indonesia.

Sasaran merupakan rumusan penjabaran dari tujuan organisasi secara lebih spesifik dan terukur dengan fokus utama pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi, sementara prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dan memiliki daya ungkit yang besar bagi kinerja pembangunan daerah. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu. Penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 ini, diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis serta adanya kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti.

Prioritas pembangunan P-RKPD Tahun 2025 ini merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun

2025- 2029 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peranan penting sebagai rujukan utama dalam pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka satu sampai lima tahun namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan baik nasional maupun provinsi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, dengan kata lain tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai sementara sasaran merupakan tindakan spesifik dan langkah terukur yang perlu diambil untuk mencapai tujuan.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029).

Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Tema RKP Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut berfokus pada komponen sebagaimana termuat pada ilustrasi di bawah berikut.

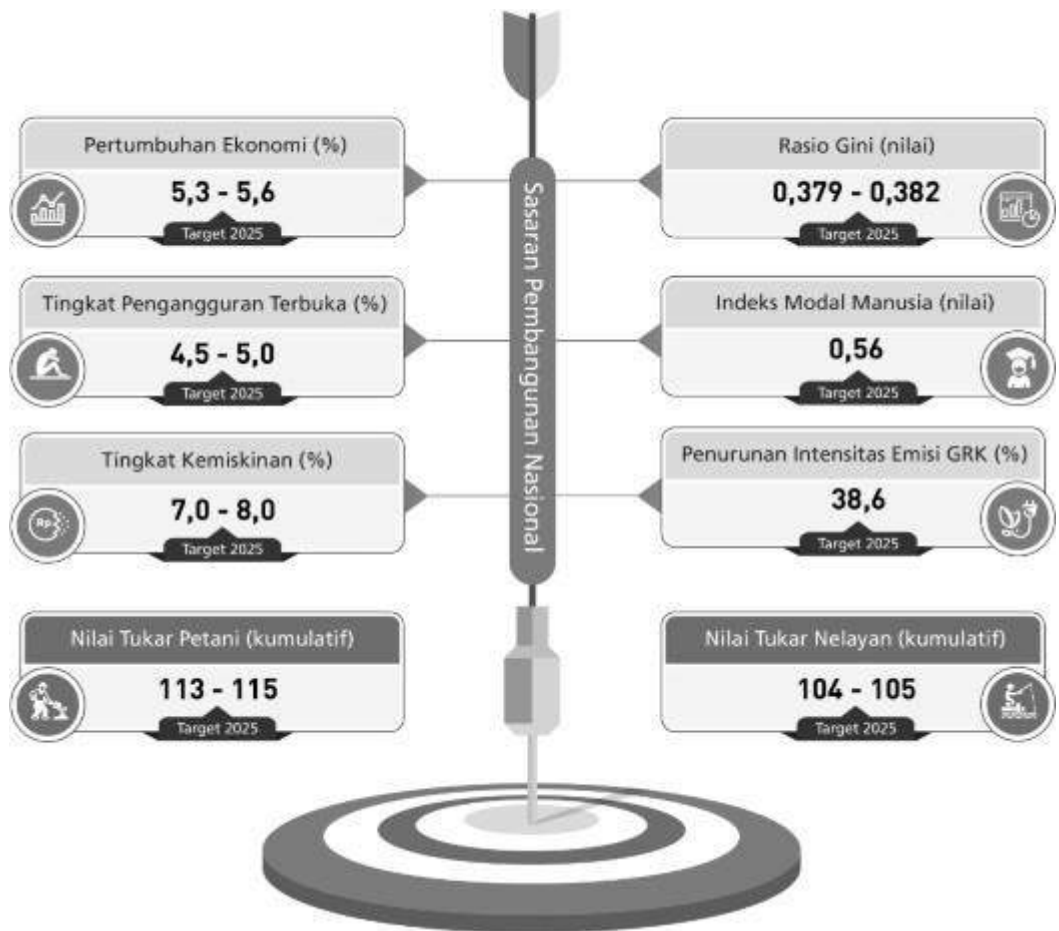
Gambar 4.1
Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025



Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rasio Gini (Indeks Gini), Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia (IMM), dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.2
Sasaran Pembangunan Tahun 2025



Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas, 2024

4.1.1.1 Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025.

Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 4,5–5,0 persen. Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0,379–0,382. Sejalan dengan hal tersebut,

kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 dan penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi pada kisaran 7,0–8,0 persen. Kesejahteraan petani dan nelayan diharapkan akan meningkat dan terjaga dengan capaian Nilai Tukar Petani pada kisaran 113–115 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 104–105.

4.1.1.2 Arah Kebijakan Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2025, prospek positif pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan akan berada pada kisaran 4,5–5,0 persen. Semakin kondusifnya perekonomian nasional juga diharapkan akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah juga akan menurun. Target Tingkat Pengangguran Terbuka wilayah Sumatera berada pada kisaran 4,2–4,7 persen, wilayah Jawa sebesar 5,1–5,6 persen, wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,2–2,7 persen, wilayah Kalimantan sebesar 4,0–4,5 persen, wilayah Sulawesi sebesar 3,2–3,7 persen, wilayah Maluku sebesar 4,6–5,1 persen, dan wilayah Papua sebesar 2,5–3,0 persen.

Arah kebijakan dan upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja; penumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; belanja pemerintah yang bersifat padat karya; dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif. Kemudian, strategi penyiapan kebhkerjaan dan keahlian angkatan kerja dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perwujudan sistem informasi pasar kerja

yang komprehensif dan kredibel, serta reformasi sistem perlindungan sosial.

4.1.1.3 Arah Kebijakan Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan berada di kisaran 7,0-8,0 persen. Hal ini mempertimbangkan banyak hal antara lain kondisi dan capaian tingkat kemiskinan sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen bahwa target ini dapat tercapai sehingga tidak mengganggu Visi Indonesia Emas 2045 menuju kemiskinan 0 persen. Beberapa hal diupayakan pemerintah antara lain melalui penyusunan peta jalan pengurangan kemiskinan dengan melakukan analisis per provinsi untuk mengkaji permasalahan di masing-masing daerah yang berpotensi memengaruhi capaian tingkat nasional.

Berdasarkan dua strategi besar pengurangan kemiskinan, yaitu strategi makro dan mikro, maka dibutuhkan kondisi yang optimal di masing-masing strategi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dijaga inklusif serta stabilitas inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan sarana dan prasarana dasar; akses terhadap informasi; layanan dasar; serta kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Arah kebijakan mikro atau program-program afirmasi disempurnakan dalam payung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui beberapa fokus, yaitu (1) perluasan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah untuk melakukan

pensasaran program; (2) peningkatan kapasitas pemerintah hingga tingkat desa/kelurahan dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti; (3) penguatan dan pelaksanaan skema graduasi program-program bantuan sosial dan komplementaritasnya dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja; (4) integrasi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan dengan pendekatan adaptif dan penyaluran nontunai; (5) penyempurnaan sasaran program utamanya untuk pilar peningkatan pendapatan masyarakat sehingga secara tepat menyasar kelompok miskin dan rentan; (6) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku penerima manfaat; serta (7) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan terutama yang berada di luar keluarga.

4.1.1.4 Arah Kebijakan Rasio Gini

Arah kebijakan untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Kedua masyarakat tersebut membutuhkan arah kebijakan dan strategi yang berbeda. Kebijakan yang tepat untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah kebijakan yang dapat mempertahankan daya beli dan meningkatkan pendapatan. Sementara, untuk masyarakat berpenghasilan tinggi, kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan yang dapat menciptakan redistribusi yang merata.

Kemudian, arah kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa strategi yang harus di implementasikan.

Strategi yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor antara lain melalui (1) pengembangan registrasi sosial-ekonomi; (2) peningkatan akurasi penargetan bantuan sosial; (3) integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; (4) penguatan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah; (5) penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata, yang utamanya ditujukan untuk kelompok berpenghasilan tinggi; (6) meningkatkan penerimaan pajak dan mulai mengurangi kebijakan terkait relaksasi pajak (tax amnesty); (7) pemberian bantuan sosial langsung dan bantuan sosial sembako untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah; dan (8) reformasi agraria bagi petani yang tidak memiliki lahan. Upaya tersebut dimaksudkan agar kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah lebih berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kelompok tersebut dapat mengalami kenaikan pendapatan yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok 20 persen teratas. Diharapkan strategi tersebut dapat mengurangi Rasio Gini menjadi lebih kecil dan dapat mencapai target Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yaitu 0,379-0,382.

4.1.1.5 Arah Kebijakan Indeks Modal Manusia

Indeks Pembangunan Manusia telah digunakan sebagai indikator pencapaian pembangunan manusia selama kurang lebih 30 tahun terakhir dengan tren meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil evaluasi capaian dan

dampak pembangunan, pengukuran Indeks Pembangunan Manusia masih terbatas pada komponen kuantitas yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta kehidupan layak (pengeluaran per kapita), sehingga dirasa belum mampu mendorong investasi pada unsur sumber daya manusia.

Pada perencanaan pembangunan periode 2025-2045 akan digunakan indikator baru yaitu Indeks Modal Manusia yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing sumber daya manusia.

Pada tahun 2025, Indeks Modal Manusia Indonesia ditargetkan mencapai nilai 0,56 melalui upaya peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Upaya peningkatan akses kesehatan untuk semua dilakukan melalui (1) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; (2) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (3) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; dan (4) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola.

Dalam hal akses dan kualitas pendidikan, akan ditingkatkan melalui (1) percepatan Wajib Belajar 13 Tahun mencakup perluasan 1 tahun pra-sekolah (perluasan Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal) dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang disertai penguatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; (2) peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan tinggi, melalui peningkatan efektivitas bantuan pendidikan, khususnya bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, berasal dari daerah afirmasi, dan berprestasi; (3)

peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penerapan kurikulum dan model pembelajaran yang mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, peningkatan kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

4.1.1.6 Arah Kebijakan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Target ambisius tersebut telah terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dimana diantara lima sasaran utama dalam Visi Indonesia 2045 adalah Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju Net-Zero Emission dengan target 93,5 persen di tahun 2045. Pada tahun 2025, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca ditargetkan mencapai 38,6 persen.

Nilai Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca didapatkan dengan memperhitungkan nilai Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca per satuan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian diperlukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rendah karbon yang selaras dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan koridor berkelanjutan dan transformasi melalui penerapan Ekonomi Hijau yang dilakukan melalui Percepatan Transisi Energi; Ekonomi Sirkular Industri; Terciptanya pekerjaan hijau (green jobs) yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing; serta Pengelolaan Hutan Lestari.

Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dilakukan dengan memperkuat program Pembangunan Rendah Karbon yaitu (1) Peningkatan Proporsi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Primer, (2) Efisiensi Energi, (3) Peningkatan Transportasi Hijau dan Berkelanjutan, (4) Peningkatan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan, (5) Pencegahan Pengurangan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan, (6) Implementasi Praktik Pertanian yang Rendah Karbon, (7) Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru, (8) Pengembangan Industri Hijau, serta (9) Pengelolaan Limbah dan Ekonomi Sirkular.

4.1.1.7 Arah Kebijakan Nilai Tukar Petani

Pada tahun 2025, Nilai Tukar Petani dijaga pada kisaran 113–115. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian Nilai Tukar Petani tersebut menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari sisi harga yang diterima dan sisi harga yang dibayarkan oleh petani.

Kebijakan dari sisi harga yang diterima berorientasi pada upaya yang meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, serta menjaga stabilisasi harga yang diterima. Kebijakan tersebut mencakup (1) pengembangan kawasan sentra produksi pangan dan sentra produksi lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian; (2) hilirisasi komoditas pertanian berbasis bioindustri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas; (3) pengembangan kelembagaan ekonomi petani menjadi korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas produk pertanian; dan (4) pengembangan ketertelusuran produk pertanian bernilai tambah seperti nilai budaya (Globally Important

Agricultural Heritage Systems), geografis/endemik (Indeks Geografis), ataupun keberlanjutan (pertanian organik).

Kebijakan dari sisi harga yang dibayar petani berorientasi pada upaya yang menjamin keterjangkauan input usaha tani meliputi (1) modernisasi akses pembiayaan usaha pertanian melalui digitalisasi akses pembiayaan serta kemitraan dengan agen sumber pembiayaan; (2) pengendalian inflasi produk agro input melalui peningkatan produksi dan akses pupuk, pestisida, benih, serta sarana dan prasarana; (3) reformasi subsidi pupuk dan input pertanian lainnya melalui Bantuan Langsung Petani; serta (4) modernisasi pertanian melalui praktik pertanian presisi dan praktik pertanian konservasi agar usaha tani lebih efisien dan berkelanjutan.

4.1.1.8 Arah Kebijakan Nilai Tukar Nelayan

Pada tahun 2025, Nilai Tukar Nelayan dijaga pada kisaran 104–105. Dalam rangka pencapaian Nilai Tukar Nelayan, upaya yang dilakukan difokuskan pada peningkatan pendapatan nelayan dan stabilisasi pengeluaran nelayan lintas sektoral melalui (1) peningkatan akses nelayan terhadap modal usaha dan sumber daya produktif lainnya seperti bahan bakar minyak bersubsidi, fasilitasi kredit, pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi; (2) peningkatan mutu ikan melalui penguatan sistem rantai dingin dan logistik perikanan, serta tempat pelelangan/pemasaran dengan standar yang memadai sehingga harga ikan terjaga; dan (3) langkah afirmatif lainnya dalam rangka memudahkan nelayan berusaha, seperti mempermudah perizinan, perlindungan nelayan, penguatan kelembagaan korporasi nelayan, pembangunan kampung nelayan, dan sertifikasi awak kapal perikanan.

4.1.1.9 Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diharapkan akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Saaran ekonomi makro nasional tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Sasaran Ekonomi Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1.	Laju Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, yoy): Akhir Periode	1,5-3,5
2.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000-15.400
3.	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	149,5-153,7
4.	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,1-6,1
5.	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,4)-(0,2)
6.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	19,3-19,6
7.	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,6
8.	Nilai Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,10
9.	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	11,20-12,00
10.	Keseimbangan Primer (% PDB)	0,00-0,00
11.	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,45)-(2,80)
12.	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	38,78-39,30
13.	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5-7,8
14.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,2-1.905,6
15.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5-842,2

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas, 2024

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Adapun tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Kualitas Pembangunan dalam rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sumatera Utara”**.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2025 yang merujuk pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran :

- Meningkatkan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan
- Meningkatkan Derajat Kesehatan
- Meningkatkan Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak

Tujuan 2 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Sasaran :

- Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat
- Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
- Meningkatnya Kesejahteraan Petani
- Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata

Tujuan 3 : Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas infrastruktur jalan
- Meningkatnya akses hunian yang layak
- Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan
- Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- Meningkatnya Ketangguhan Bencana

Tujuan 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif

Sasaran :

- Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aser Daerah
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Meningkatnya pelayanan publik yang prima
- Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah
- Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan

Untuk lebih jelas terkait tujuan, sasaran beserta indikator kinerja tujuan/sasaran serta target Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 dalam RPD dan RKPD dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja dan Target Kinerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Tujuan Dan Sasaran		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	CAPAIAN	TARGET 2025	
				2023	RPD	RKPD
1		2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	Poin	75,13	73,10-73,40	76,00
	1.1 Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	70,18	71,03	71,37
	1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Tahun	82,57	76,69	83,1
	1.3 Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	91,31	91,06	91,5
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	LPE	Persen	5,01	5,20-2,40	5,2-5,4
		Inflasi	Persen	2,25	2,75±1%	2,75±1%
		Gini Rasio	Poin	0,309	0,32	0,305-0,303
	2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Persentase Kemiskinan	Persen	8,15	8,20-8,00	7,46-6,96
	2.2 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,89	5,50-5,20	5,56-5,27
	2.3 Meningkatnya Kesejahteraan Petani	NTP	Poin	129,04	125,23	134,5

	2.4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	2,11	7,25	2,30-2,50
3			Indeks Infrastruktur	Poin	0,750	0,806	0,759
		Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO ₂ eq	29,05	30,16	30,16
	3.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Peresentase Jalan Mantap	Persen	76,5	88,06	78,61
	3.2	Meningkatnya akses hunian yang layak	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Persen	70,95	73	74,61
	3.3	Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	poin	60	57,1	57,1
	3.4	Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Indeks Williamson	Poin	0,560	0,3840	0,520
	3.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,8	74,24	72.20
	3.6	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Risiko Berencana	Poin	140,73	141,5	140
4		Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin Predikat	75,18(B)	72,25 (BB)	81,10 (A)
	4.1	Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
	4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Poin Predikat	68,85 (B)	72,00 (BB)	72,00 (BB)
	4.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Poin Predikat	3,51	4,45 (A-)	4.1 (A-)
	4.4	Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	indeks Inovasi Daerah	Poin Predikat	53,76 (Inovatif)	57,50-60,00 (Inovatif)	57,50-60,00 (Inovatif)
	4.5	Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan	Peringkat PPD	Peringkat	12	12	12

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Pada tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara memiliki 9 (sembilan) Sasaran Makro Pembangunan yang terdiri, sasaran tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.3
Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025



Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengarahkan fokus pembangunan tahun 2025, pada :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3. Peningkatan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan
4. Penyediaan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Visi merupakan gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai, bersifat inspiratif dan jangka panjang, sementara Misi menjelaskan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut melalui program dan kebijakan terukur. Keduanya harus spesifik, terukur, dan selaras dengan tantangan aktual (seperti regenerasi petani atau adaptasi iklim) untuk memastikan implementasi efektif. Keberhasilan ditunjukkan oleh konsistensi antara pernyataan visi-misi dengan alokasi sumber daya dan capaian kinerja. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Tapanuli Tengah yang telah

ditetapkan maka harus ditentukan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.

Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban

Visi tersebut memiliki makna, yaitu :

1. Adil untuk Semua

Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Lestari

Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi daerah yang asri memiliki lingkungan yang asri dan menjadi tempat yang nyaman untuk berusaha dan bertempat tinggal

3. Berkeadaban

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjunjung tinggi nilai budaya dan harmonisasi keberagaman, kebenaran, dan berkeadilan sosial, serta memiliki daya saing unggul.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun 9 misi pembangunan jangka menengah. Adapun 9 misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang berkarakter dan berkualitas untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang cerdas dan berdaya saing, serta terampil dan inovatif. Hal ini akan dicapai melalui pembangunan pendidikan dan ekosistem pembelajaran yang adaptif berbasis digital, serta tenaga pendidik yang berkualitas.

2. Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani.
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif, di mana seluruh masyarakat dari seluruh golongan dapat merasakannya. Peningkatan akses kesehatan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang berbasis teknologi, serta dokter dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah.
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif.
Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif.
4. Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah secara optimal. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah juga akan ditenahi lebih baik lagi agar mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah sebagai sumber dana untuk membiayai keperluan pembangunan daerah.
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata

pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban.

Meningkatkan pelayanan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui implementasi sistem pemerintahan yang berbasis teknologi sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh akses yang sama. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga akan meningkatkan kapasitas dan daya saing ASN sehingga memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia.

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah kuat budaya, serta menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan dan toleransi antar umat beragama.

7. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah kuat budaya, serta menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan dan toleransi antar umat beragama.

Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, memperlancar aktivitas ekonomi, dan meningkatkan mobilitas masyarakat.

8. Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah secara optimal dengan pelaksanaan pembangunan yang

tidak merusak lingkungan sekitar sehingga menjaga kebersihan dari lingkungan hidup Kabupaten Tapanuli Tengah.

9. Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi.

Melaksanakan pembangunan secara adil dan merata ke seluruh desa sehingga seluruh masyarakat dapat merasakannya. Masyarakat desa diberdayakan sehingga memiliki keterampilan yang baik dan mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan ekonominya.

Berikut adalah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 :

Tabel 4.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban										
1	Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri									
	1.1	Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	Indeks Pendidikan (Poin)	73,34	74,55 – 76,76	74,91- 77,16	75,27- 77,56	75,63- 77,96	75,99- 78,36	76,35- 78,76
	1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Literasi (Poin)							
			Numerasi (Poin)							
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)							
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)							
	1.1.2	Meningkatkan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)							
	1.2	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan wirausaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,45	7,65- 7,49	7,54- 7,41	7,43- 7,33	7,32- 7,25	7,21- 7,17	7,1-7,09
	1.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/jiwa)							
	1.1.3	Meningkatnya minat masyarakat untuk berwirausaha	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		2,63	2,90	3,17	3,44	3,70	3,97
2	Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani									
	2.1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (Poin)	0,783	0,782- 0,785	0,786- 0,789	0,791- 0,793	0,795- 0,798	0,799- 0,802	0,803- 0,806
	2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)							
			Indeks Keluarga Sehat (Poin)							
	2.1.2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)		90,24	90,63	91,02	91,40	91,79	92,18
	2.1.3	Menurunnya angka stunting	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada		21,3	19,85	18,50	17,24	16,07	14,97

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			balita (%)							
3	Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif									
	3.1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,80	10,20 – 9,53	9,68-8,99	9,19-8,48	8,72-8	8,28-7,54	7,86-7,11
	3.1.1	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio (Poin)	0,234	0,230 – 0,240	0,227-0,237	0,224-0,234	0,221-0,231	0,218-0,228	0,215-0,225
	3.1.2	Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat	Indeks Keberfungsian Sosial (Poin)							
	3.1.3	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi (%)	2,94						
	3.1.4	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)							
	3.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Per Kapita (Rp juta)	34,62						
	3.2.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (Poin)							
	3.2.2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan (Poin)							
	3.2.3	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)							
	3.2.4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)							
4	Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi									
	4.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,15	4,33 – 4,47	4,34-4,5	4,35-4,53	4,36-4,56	4,37-4,59	4,38-4,62
	4.1.1	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	11,26	11,61 – 11,80	12,04-12,24	12,49-12,7	12,95-13,17	13,43-13,66	13,93-14,17
	4.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	1,33	1,32-1,39	1,35-1,42	1,38-1,45	1,42-1,48	1,46-1,51	1,5-1,54
	4.1.	Terwujudnya iklim investasi	Persentase Peningkatan							

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		3 yang kompetitif	Investasi (%)							
		4.1. Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)							
		4.1.5 Meningkatnya literasi digital masyarakat	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	40,34						
	4.2	Meningkatkan kemandirian daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	7,34	8,67	10,25	12,12	14,32	16,92	20,00
		4.2.1 Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,0018	0,38-0,48	0,4-0,5	0,42-0,52	0,44-0,54	0,46-0,57	0,49-0,6
		4.2.2 Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah	RoA BUMD (%)							
5 Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban										
	5.1	Menciptakan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Pelayanan Publik (Poin)		2,30	2,37	2,44	2,51	2,59	2,66
	5.1.1	Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)		60-70	61,5-71,5	63-73	64,5-74,5	66-76	67,5-77,5
	5.1.2	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)							
	5.1.3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)							
	5.1.4	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)							
6 Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia										
	6.1	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)							
	6.1.1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	56,74	48,88-57,64	49,12-57,64	49,36-57,64	49,6-57,64	49,84-57,64	50,08-57,64
	6.1.	Terwujudnya berkebudayaan	Indeks Pembangunan							

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		2 maju	Kebudayaan (Poin)							
		6.1. Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)		0,41-0,45	0,398-0,444	0,387-0,438	0,376-0,432	0,365-0,426	0,355-0,42
			Indeks Perlindungan Anak (Poin)							
7	Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan, serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya									
	7.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur (Poin)		65,00	66,42	67,86	69,34	70,85	72,39
	7.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Poin)							
	7.1.2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas (%)							
	7.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)							
	7.1.4	Meningkatkan infrastruktur yang resilien terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (Poin)							
8	Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup									
	8.1	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)		81,81	81,98	82,14	82,31	82,48	82,65
	8.1.1	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Poin)							
			Indeks Kualitas Udara (Poin)							
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)							
	8.1.2	Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)							
	8.1.3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)							
	8.1.	Menurunnya emisi gas rumah	Penurunan Emisi GRK (ton							

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		4 kaca	CO2eq)							
9	Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi									
	9.1	Mewujudkan pembangunan desa yang merata	Persentase Desa Mandiri (%)	-	0,00	0,63	1,26	1,89	2,52	3,15
	9.1.1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,6023	0,617	0,632	0,648	0,663	0,680	0,696

Tujuan dan sasaran pembangunan P-RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, diarahkan untuk pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, mengingat Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan satu kesatuan atau bagian dari perencanaan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah juga ditujukan untuk pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKD, selain memuat indikator makro dan IKK, juga memuat indikator utama pembangunan yang tercantum pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2045 yang belum tercantum pada IKU, yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2045.

4.1.3.1 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah diarahkan untuk mencapai visi pembangunan daerah, "Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban". Dalam pelaksanaannya, pemerintah berupaya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif serta memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pemerintah perlu mempersiapkan keberlanjutan pembangunan selama periode penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan mengembangkan fokus-fokus pembangunan.

Penyusunan tema pembangunan sebagai fokus utama dilakukan secara tahunan dengan menyesuaikan kepada isu-isu strategis yang akan diselesaikan melalui penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan tema pembangunan juga memberikan perencanaan yang lebih terstruktur sehingga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan dan isu strategis sembari mewujudkan visi dan misi-misi daerah.

Tema pembangunan disusun sebagai prioritas pembangunan daerah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan. Pemerintah juga mempersiapkan arah kebijakan tahunan yang disusun secara bertahap mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi kepemimpinan. Hal ini dilakukan untuk mengedepankan keberlanjutan pembangunan pada periode pembangunan jangka menengah berikutnya.

Gambar 4.4
Tahapan Pembangunan Tahunan Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2026-2030



Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025–2029 didasarkan dengan memedomani arah kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 – 2045, khususnya pada bagian pembangunan tahap pertama. Pemerintah mempersiapkan periode perencanaan tahun 2025 sampai dengan 2029 serta pedoman pembangunan pada masa transisi pemerintahan tahun 2030.

Fokus Pembangunan Tahun 2025

Fokus penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 adalah tahapan konsolidasi dan persiapan awal pembangunan daerah. Perencanaan pada tahun 2025 disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah pada tahun berjalan, sesuai dengan periodisasi kepemimpinan RPJMD yang baru dimulai pada tahun 2025. Pemerintah

fokus dalam penyesuaian program prioritas sesuai dengan visi-misi Kepala Daerah yang menjadi visi-misi Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemerintah melakukan konsolidasi untuk penguatan kelembagaan serta regulasi-regulasi pendukung yang mempersiapkan arah kebijakan transformasional ke depannya. Pemerintah juga sudah mulai merintis penyelenggaraan program-program unggulan daerah yang dapat memberikan hasil cepat (quick win) penyelenggaraan pemerintahan

Tahun 2026 : Fondasi Kesejahteraan

Tahun 2026 menjadi tahun yang difokuskan untuk memperkuat fondasi dasar kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tapanuli Tengah memprioritaskan kesejahteraan masyarakat sebagai titik utama pembangunan di daerah. Pemerintah memperkuat modal dasar pembangunan untuk persiapan penyelenggaraan kebijakan transformasional baik dari ekonomi, sosial maupun tata kelola menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Pemerintah mengutamakan pemerataan layanan kepada seluruh masyarakat sehingga dapat mendukung pencapaian peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif.

Tahun 2027 : Transformasi Daerah

Dengan terwujudnya penguatan fondasi kebijakan transformasi yang kokoh pada tahun 2026, pemerintah berupaya membangun arah kebijakan transformasional. Pemerintah berupaya mengoptimalkan transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga layanan pemerintahan dapat dinikmati oleh seluruh

masyarakat yang berkeadilan. Pemerintah mengedepankan transformasi sosial untuk memberdayakan dan melindungi seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang non-produktif secara ekonomi dan terkendala keterampilan. Pemerintah juga menyelenggarakan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal, membangun kemandirian daerah serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Tahun 2028 : Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Demi mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kabupaten Tapanuli Tengah memerlukan optimisasi infrastruktur dan aksesibilitas dari berbagai aspek pembangunan. Pemerintah fokus untuk meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta transisi hijau dalam aspek pembangunan. Pemerintah berupaya memberikan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas kepada seluruh masyarakat. Pemerintah juga meningkatkan akses infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang murah dan terjangkau. Arah kebijakan pembangunan dilakukan dengan menerapkan transisi hijau untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

Tahun 2029 : Nilai Budaya, Pendidikan Karakter dan Kepariwisata

Visi dan misi-misi Kabupaten Tapanuli Tengah tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan transformasi dari nilai-nilai budaya, karakter dan kepariwisataan. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan pembangunan nilai-nilai

budaya dan pendidikan karakter dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk menyinergikan pembangunan kebudayaan dalam kepariwisataan dan transformasi sosial. Penyelenggaraan pemerintahan berupaya untuk mencapai masyarakat berkeadilan yang tetap menjaga nilai-nilai budaya dan lingkungan yang lestari serta memberikan kesejahteraan yang berkeadilan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah

Tahun 2030 : Memperkuat Tapanuli Tengah yang Adil, untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban

Tahun 2030 menjadi tahun transisi kepemimpinan daerah sehingga fokus penyelenggaraan pemerintahan dibagi ke dua fokus utama, yaitu (1) memperkuat capaian pembangunan daerah yang memberikan wujud nyata dari visi-misi Kabupaten Tapanuli Tengah 2025-2029 dengan mewujudkan Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban. Selain itu pemerintah juga mempertahankan capaian pembangunan sembari mempersiapkan transisi kepemimpinan daerah menuju periode pelaksanaan RPJPD Tahap 2.

Penjelasan tema pembangunan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 – 2029 yang tertuang dalam tema prioritas pembangunan tahun 2026 sampai dengan 2030 dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tahapan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah

Prioritas Pembangunan Daerah	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tema	Penguatan modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif	Penguatan landasan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal dan iklim investasi yang kondusif	Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta transisi hijau dalam aspek pembangunan	Pembangunan nilai-nilai budaya dan pendidikan karakter dalam tatanan kehidupan bermasyarakat	Perwujudan pembangunan Tapanuli Tengah yang Adil untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban serta transisi kepemimpinan
Penjelasan umum	Pemerintah fokus untuk memperkuat modal dasar pembangunan terutama dari sisi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar yang mencapai seluruh daerah termasuk daerah terpencil	Pemerintah melaksanakan pembangunan dengan memperkuat sektor perekonomian dengan memanfaatkan keunggulan lokal dengan pendekatan keberlanjutan. Penguatan UMKM dan iklim investasi pada tahapan ini juga menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pemerintah fokus untuk mengembangkan infrastruktur transportasi, digitalisasi serta energi yang mendukung konektivitas antar daerah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan juga menjadi kunci dalam transisi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan	Pemerintah berupaya untuk memperkuat identitas budaya serta nilai-nilai lokal dalam pembangunan. Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pendidikan karakter, pelestarian budaya serta kepariwisataan berbasis budaya sebagai dasar perwujudan pembangunan masyarakat yang berkeadaban	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengoptimalkan sinergi pembangunan berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga menjadi daerah yang berkeadilan dan berdaya saing. Sinergi ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah mewujudkan capaian berkeadaban dengan menjaga nilai-nilai luhur.

Dengan berdasar pada strategi, tema dan arah pembangunan yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya maka dirumuskan arah kebijakan yang dipersiapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Penetapan arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut menjadi acuan penetapan program dan kegiatan sebagai bentuk perwujudan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebagai bentuk perwujudan strategi utama pembangunan ditetapkan program prioritas Kabupaten Tapanuli Tengah setiap tahun yang disesuaikan dengan tema dan arah pembangunan.

Tabel 4.5
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tapanuli Tengah

Visi: Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban			
Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri			
1.1 .1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkarakter ke seluruh daerah	Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas guru dan mengembangkan kurikulum pendidikan berkarakter
			Memberikan bantuan beasiswa sebagai akses pendidikan yang merata kepada keluarga kurang mampu dan berprestasi
			Merevitalisasi sekolah dengan fasilitas yang memadai dan memiliki akses untuk internet dan perpustakaan digital
1.1 .2	Meningkatnya literasi masyarakat	Memberdayakan fungsi dan layanan gerakan membaca dan melek literasi	Mendorong keterlibatan masyarakat dan komunitas untuk mengikuti gerakan literasi ilmiah
			Mempersiapkan akses internet gratis di ruang publik untuk langganan perpustakaan digital
			Membangun dan mempersiapkan perpustakaan desa, taman baca masyarakat serta pojok baca di ruang terbuka publik
1.2 .1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Memperkuat fungsi balai latihan kerja berbasis kebutuhan industri lokal
			Memberikan pelatihan dan sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja
1.3 .1	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM daerah	Memperluas akses permodalan bagi masyarakat yang ingin merintis usaha atau bekerja mandiri
			Memberikan pelayanan inovasi bisnis dan inkubator usaha bagi wirausaha pemula
Misi 2: Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani			
2.1 .1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan dan upaya promotif-preventif kesehatan melalui edukasi dan pemeriksaan kesehatan	Memperkuat pelayanan Puskesmas dan tenaga medis yang memadai dengan akses yang mudah dari seluruh kecamatan
			Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta berkecukupan gizi
			Memperkuat deteksi penyakit menular dan tidak menular serta penanganan permasalahan kesehatan yang lebih baik
2.1 .2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan kepada masyarakat	Memberikan fasilitas transportasi untuk mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat
			Memastikan masyarakat telah memiliki akses BPJS Kesehatan untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan
			Memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil
			Meningkatkan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak balita
			Memberikan pemeriksaan kehamilan gratis secara berkala untuk deteksi dini stunting
Misi 3: Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif			
3.1 .1	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Menerapkan kebijakan fiskal progresif dan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah	Memberikan pelatihan kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif kepada masyarakat untuk berwirausaha
			Meningkatkan keterampilan kerja melalui kemitraan dan pelatihan vokasional
3.1	Meningkatnya kesejahteraan	Memperluas jaminan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam

Visi: Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban			
Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
.2	sosial	sosial dan bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu	pelayanan sosial
			Memberikan bantuan sosial secara tepat sasaran
3.1 .3	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Mengoptimalkan sistem distribusi dan stok pangan untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga	Mendistribusikan pangan secara merata ke seluruh wilayah sesuai kebutuhan
			Menguatkan pengawasan terhadap jaringan distribusi pangan
3.1 .4	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Mendukung produktivitas pertanian melalui teknologi tepat guna dan perbaikan infrastruktur penyimpanan	Mempersiapkan kawasan pertanian terpadu untuk peningkatan produktivitas pangan daerah
			Mempersiapkan diversifikasi sumber pangan lokal
3.2 .1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Memberikan akses harga yang adil dan pelatihan agribisnis bagi petani kecil	Memberikan subsidi alat dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian daerah
			Mengembangkan rantai distribusi yang lebih optimal untuk pemasaran hasil pertanian
3.2 .2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Menyediakan sarana tangkap modern dan akses pasar yang luas untuk nelayan tradisional	Mempersiapkan bantuan peralatan tangkap ikan yang ramah lingkungan untuk mengoptimalkan hasil tangkapan ikan
			Memberikan pelatihan untuk pengolahan hasil tangkapan ikan yang memberikan nilai tambah kepada nelayan dan masyarakat
3.2 .3	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Mendorong kebijakan inklusif dan pelatihan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas	Meregulasi kebijakan kuota minimal bagi perusahaan dan instansi pemerintah dalam merekrut tenaga kerja disabilitas
			Memberikan pelatihan kerja berbasis keterampilan digital untuk penyandang disabilitas
3.2 .4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Menyediakan perlindungan sosial dan program pengembangan keterampilan untuk pekerja informal	Meregulasi lingkungan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas
			Memberikan perlindungan sosial yang layak bagi tenaga kerja rentan dalam sektor informal
Misi 4: Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi			
4.1 .1	Meningkatnya daya saing industri	Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur logistik yang terintegrasi	Mengembangkan kawasan industri terpadu berbasis potensi daerah
			Meningkatkan infrastruktur logistik yang lebih baik untuk kelancaran distribusi barang
4.1 .2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan pariwisata dan kebudayaan, serta karya ekonomi kreatif dengan kearifan lokal	Mengelola daya tarik dan destinasi wisata dengan konsep berkelanjutan dan mengintegrasikan budaya lokal
			Memberikan pelatihan dan pengembangan desa wisata melalui keterlibatan masyarakat setempat sebagai pelaku utama
4.1 .3	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Menyederhanakan regulasi serta memberikan insentif yang menarik bagi investor	Mempersiapkan perencanaan penyelenggaraan festival budaya sebagai daya tarik wisata
			Mempersiapkan penawaran peluang investasi kepada para investor melalui penyusunan potensi investasi daerah
4.1 .4	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Memperkuat rantai pasok dan memperluas jaringan distribusi dalam negeri dan ekspor	Meningkatkan akses konektivitas antar wilayah
			Memberikan insentif dan kemudahan berinvestasi di daerah pada sektor-sektor unggulan
4.1 .5	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Menyelenggarakan pelatihan dan literasi digital yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat	Penguatan nilai tambah melalui hilirisasi produk-produk lokal
			Peningkatan akses menuju pasar lokal, luar daerah, nasional dan internasional
4.1 .5	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Menyelenggarakan pelatihan dan literasi digital yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat	Menyediakan jaringan internet dan telekomunikasi di seluruh daerah khususnya pada area blank spot
			Memberikan sosialisasi dan edukasi digital bagi seluruh masyarakat secara berkala

Visi: Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban			
Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4.2 .1	Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah	Mengoptimalkan potensi daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan peningkatan efisiensi pajak daerah	Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah
			Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
4.2 .2	Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah	Meningkatkan profesionalisme manajemen dan inovasi layanan di BUMD agar lebih kompetitif dan produktif	Meningkatkan kualitas tata kelola BUMD
			Menginisiasi diversifikasi bisnis dan inovasi
Misi 5: Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban			
5.1 .1	Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Menguatkan sistem e-government yang terbuka dan mekanisme pelaporan publik secara real-time	Meningkatkan penerapan e-government dalam memberikan transparansi layanan publik
			Memperkuat kapasitas unit pemberantas korupsi terutama pada urusan yang rawan terhadap korupsi
5.1 .2	Meningkatnya profesionalitas ASN	Melaksanakan pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja berbasis kompetensi	Memperkuat pelaksanaan penilaian kinerja ASN berbasis kompetensi dan meritokrasi
			Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada ASN untuk membangun kompetensi dan profesionalitas diri
5.1 .3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif dan berbasis data dalam proses perencanaan	Membangun kolaborasi dengan masyarakat sebagai bagian dari penilaian pemberian pelayanan publik dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah agar kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5.1 .4	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM dalam program sosialisasi dan sekolah	Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam meningkatkan analisis kebijakan publik
			Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan masyarakat
5.1 .4			Meningkatkan perlindungan kepada Hak Asasi Manusia melalui hukum yang berkeadilan
Misi 6: Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia			
6.1 .1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Meningkatkan edukasi parenting dan kesehatan keluarga secara berkelanjutan	Memberikan layanan konseling keluarga dalam membina perilaku rumah tangga yang harmonis
			Membangun kebijakan yang memberikan keseimbangan work-life balance kepada masyarakat sehingga tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga
6.1 .2	Terwujudnya berkebudayaan maju	Meningkatkan pelestarian cagar budaya daerah	Memberikan edukasi parenting bagi orang tua untuk mengoptimalkan pola asuh positif di lingkungan keluarga
			Mempersiapkan pusat kebudayaan dan galeri seni untuk melestarikan warisan budaya daerah
6.1 .3	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Menguatkan regulasi dan kampanye kesetaraan gender serta layanan perlindungan anak yang responsif.	Membangun integrasi budaya dalam pendidikan berbasis kurikulum muatan lokal berkarakter dan berbudaya
			Membangun sinergi dengan pelaku industri kreatif dalam mengembangkan ekonomi berbasis budaya daerah
6.1 .3			Memberikan pelatihan dan keterampilan bagi perempuan untuk mendorong partisipasi perempuan di lingkungan kerja
			Membangun kebijakan penegakan hukum terhadap kasus bullying, kekerasan anak dan eksploitasi anak
Misi 7: Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan,			

Visi: Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban			
Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya			
7.1 .1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Melaksanakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dengan prioritas wilayah tertinggal dan padat penduduk	Mengoptimalkan perluasan akses jaringan listrik dan air bersih untuk menjangkau seluruh wilayah Tapanuli Tengah
			Meningkatkan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas desa dan kecamatan
7.1 .2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Mengembangkan moda transportasi massal yang terintegrasi dan tarif yang ramah bagi masyarakat	Meningkatkan keamanan di jalan lintas dengan pemasangan rambu, penerangan jalan serta pemantauan pada daerah rawan kecelakaan Mewujudkan layanan transportasi publik yang nyaman dan modern untuk mendukung aksesibilitas dan keterhubungan antar wilayah dengan angkutan umum masif
7.1 .3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Mendorong pembangunan perumahan dengan konsep ramah lingkungan dan subsidi bagi keluarga berpenghasilan rendah	Mempersiapkan kemudahan akses kredit perumahan bersubsidi kepada masyarakat khususnya pekerja sektor informal dan UMKM Mewujudkan revitalisasi kawasan permukiman kumuh serta memberikan fasilitas air bersih dan sanitasi layak di seluruh rumah
7.1 .4	Meningkatkan infrastruktur yang resilien terhadap bencana	Menerapkan standar bangunan tahan bencana dan meningkatkan sistem peringatan dini di daerah rawan	Mempersiapkan sistem peringatan dini untuk bencana alam, khususnya banjir, longsor, gempa dan tsunami Memberikan simulasi tanggap darurat bencana secara berkala kepada aparaturnya dan masyarakat
Misi 8: Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup			
8.1 .1	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Menerapkan pengelolaan kawasan hijau dan pengawasan kualitas udara, air, dan lahan	Melaksanakan kebijakan konservasi hutan lindung dan normalisasi daerah aliran sungai Meningkatkan pengawasan terhadap limbah industri dan persampahan Mendorong keterlibatan masyarakat dalam program gotong royong merawat lingkungan serta sadar lingkungan
			Mempersiapkan pemanfaatan tenaga matahari dan angin untuk mendukung kebutuhan energi, khususnya pada sektor perikanan dan pertanian Mendorong reformasi perilaku hemat energi kepada masyarakat dan industri Mengoptimalkan konversi energi berbasis biomassa dan biogas dalam sektor pertanian dan peternakan sebagai sumber energi
8.1 .3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Mengoptimalkan sistem pengumpulan, daur ulang, dan edukasi pengurangan sampah di masyarakat	Menguatkan sistem pengelolaan sampah
8.1 .4	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Mendorong penggunaan teknologi rendah karbon dan restorasi ekosistem penyerap karbon	Meningkatkan bauran EBT pada sektor energi listrik dan transportasi
Misi 9: Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi			
9.1 .1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Mengembangkan badan usaha dan kelembagaan ekonomi desa sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal	Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dan koperasi desa sebagai penggerak ekonomi desa
			Memperkuat kelembagaan dan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel
			Memperkuat perekonomian melalui produk unggulan di setiap desa
			Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak

Tujuan dan sasaran pembangunan P-RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, diarahkan untuk pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, mengingat Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan satu kesatuan atau bagian dari perencanaan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah juga ditujukan untuk pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKD, selain memuat indikator makro dan IKK, juga memuat indikator utama pembangunan yang tercantum pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2045 yang belum tercantum pada IKU, yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2045.

Indikator makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Rasio Gini. Indikator makro menjadi salah satu parameter keberhasilan pembangunan di Deli Serdang. Selain itu, indikator makro Kabupaten Tapanuli Tengah juga menjadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergis dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan RKPD setiap tahunnya.

Tema Pembangunan Tahun 2025: ***“PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI GUNA MENINGKATKAN KESEJATERAAN MASYARAKAT”***.

Penguatan pembangunan inklusif di Tapanuli Tengah dapat menyebabkan pemerataan kesejahteraan di seluruh sektor/golongan masyarakat. Ekonomi inklusif ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi permasalahan di Tapanuli Tengah. Dalam mencapai tema tahun 2024, prioritas pembangunan Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
- Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas Pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.
- Peningkatan modal sosial masyarakat Tapanuli Tengah yang religius dan berbudaya.
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
- Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam rangka mendukung perekonomian dan Pelayanan Dasar.

4.2.1. Program Prioritas Daerah

Program prioritas daerah merupakan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Dalam perumusan dokumen perencanaan, program dianggap menjadi cikal bakal keberhasilan tujuan dan sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Program prioritas yang tercantum dalam tabel di bawah ini merupakan program yang sudah disesuaikan dengan nomenklatur di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode.

Tabel 4.6
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri				
1		Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing		Indeks Pendidikan (Poin)	
1		1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah		Literasi (Poin)	
1				Numerasi (Poin)	
1				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
1				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	
1				Persentase Anak Usia 16-18 Tahun Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	
1		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah dalam Pendidikan Menengah (APS)		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Pengelolaan Pendidikan
1		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan		Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Pengembangan Kurikulum

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		1. Meningkatkan literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	
			Meningkatnya layanan perpustakaan	Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	Pembinaan Perpustakaan
		1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan wirausaha		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
		2. Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/jiwa)	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Pelatihan Kerja
		1. Meningkatkan kontribusi UMKM dalam perekonomian		Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha	Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)
		2 Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani			
		2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan (Poin)	
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup (Tahun)	
3	Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif			Indeks Keluarga Sehat (Poin)	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Pemenuhan Upaya Kesehatan
		2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	
			Meningkatnya jaminan sosial	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	Perlindungan Sosial
		3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Persentase Penduduk Miskin (%)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
3.1.1		Menurunnya ketimpangan pendapatan		Gini Ratio (Poin)	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin)	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Indeks Peranan Sosial	Rehabilitasi Sosial
		Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Inflasi (%)	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau		Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Meningkatnya pendapatan masyarakat		PDRB Per Kapita (Rp juta)	
		Meningkatnya kesejahteraan petani		Nilai Tukar Petani (Poin)	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan produksi hortikultura Peningkatan produksi komoditas peternakan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Meningkatnya kesejahteraan nelayan		Nilai Tukar Nelayan (Poin)	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap
3.2.3		Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Rehabilitasi Sosial

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		3. Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	
			Meningkatnya jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Perlindungan Sosial
4	Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi				
	4.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	4.1.1	Meningkatnya daya saing industri		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri
	4.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata
	4.1.3	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi (%)	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor	Promosi Penanaman Modal
	4.1.4	Meningkatnya nilai tambah perdagangan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) / Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
5	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban	4.1.5 Meningkatkan literasi digital masyarakat		Indeks Masyarakat Digital (Poin)	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		4.2.2 Meningkatkan kemandirian daerah		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	
		4.2.1 Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah
		4.2.2 Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah		RoA BUMD (%)	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Pengelolaan Pendapatan Daerah
		5.1.1 Menciptakan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Indeks Pelayanan Publik (Poin)	
		5.1.1 Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Penataan Organisasi
5	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban	5.1.2 Meningkatkan profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Kepegawaian Daerah
		5.1.3 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	
			Meningkatnya kualitas perencanaan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Pembangunan Daerah
		5. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
6	Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia				
6.1		Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan harmonis		Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	
6.1.1		Terwujudnya keluarga yang berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Pengendalian Penduduk
6.1.2		Terwujudnya berkebudayaan maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Pengembangan Kesenian Tradisional
6.1.3		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak		Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	
				Indeks Perlindungan Anak (Poin)	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Peningkatan Kualitas Keluarga

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
----	-------------	----------------	---------	-----------	-------------------

perempuan dan anak

7 Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan, serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya

7.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (Poin)	
7.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Poin)	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Pengembangan Permukiman
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Pengelolaan Sumber Daya Air
7.1.2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas (%)	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
7.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	
		Meningkatnya penyediaan permukiman PSU	Persentase PSU Permukiman yang Sudah Dilengkapi	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
7.1.4	Meningkatkan infrastruktur yang resilien terhadap bencana		Indeks Risiko Bencana (Poin)	
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			terhadap bencana		
8	Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup				
	8.1	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	
	8.1.1	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan	Indeks Kualitas Air	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
	8.1.2	Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan		Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
				Porsi EBT dalam Bauran Energi	
	8.1.3	Meningkatnya pengelolaan sampah		Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Persampahan
	8.1.4	Menurunnya emisi gas rumah kaca		Penurunan Emisi GRK (ton CO ₂ eq)	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan	Indeks Kualitas Udara	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
9	Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi				
	9.1	Mewujudkan pembangunan desa yang merata		Persentase Desa Mandiri (%)	
	9.1.1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa Membangun (Poin)	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Penataan Desa

4.3 Program Inovasi Daerah

Pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bertujuan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Kondisi saat ini permasalahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan inovasi dan terobosan tanpa mengabaikan relasi yang ada sehingga dapat melaksanakan pembangunan daerah melalui inovasi daerah. Inovasi Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

A. Inovasi Proses Perencanaan Pembangunan

Untuk mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, senantiasa dikembangkan inovasi dari mulai perencanaan hingga pelaporan, pelayanan bagi masyarakat dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Inovasi daerah ini merupakan semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi jenis, prosedur, dan metoda pelayanan publik. Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen melakukan inovasi di bidang pelayanan masyarakat serta memudahkan bagi pelaku UMKM dan pelaku ekonomi di bidang komoditas unggulan.

Gambar 4.5
Pelayanan Pada Dinas PMPPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah



Sumber: Dinas PMPPTSP Kab. Tapanuli Tengah

Pelayanan publik yang terpadu merupakan landasan pembangunan yang kokoh yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien. Di masa pandemi Covid-19 ini, pelayanan publik masih berjalan dengan memerhatikan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah pusat. Namun pelayanan ini terbatas dan menyulitkan beberapa masyarakat yang tinggal di pelosok Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu diperlukan inovasi pelayanan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal-hal yang dilakukan antara lain pelayanan kependudukan selain di hari kerja juga dilakukan di hari Sabtu; adanya integrasi pelayanan berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat pelosok untuk melakukan pelayanan secara online yang mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam pelayanan.

Gambar 4.6
Inovasi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM

Selain di bidang pelayanan publik, UMKM menjadi salah satu bidang yang untuk dilakukannya inovasi terutama UMKM yang mengembangkan produk unggulan daerah. Inovasi yang dilakukan dengan mengikuti Ekspo produk unggulan daerah dengan penyelenggaraan pameran tingkat lokal maupun keikutsertaan dalam

ajang pameran tingkat regional (provinsi Sumatera Utara) dan nasional. Inovasi di bidang UMKM lainnya adalah dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan kreasi intelektual (knowledge based economy) seperti barang seni atau kerajinan, fashion, fotografi, periklanan, film pendek, dan sebagainya. Serta pengembangan UMKM berbasis teknologi digital melalui pelatihan bisnis online agar produk UMKM dapat dikenal banyak kalangan

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang didasarkan pada kebutuhan dan dinamika yang berkembang pada tahun berjalan. Implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan yang prioritas. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah disinkronisasikan berdasarkan evaluasi pembangunan dan capaian dalam RPD serta isu strategis.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2025 menjadi acuan untuk penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan P.APBD Tahun 2025 dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kepala Daerah sebagai stimulus pedoman penyusunan RKA Perubahan-OPD. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) untuk tahun 2025 disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030.

Berdasarkan permasalahan pembangunan, isu strategis dan tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dirumuskan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah :

- 1. Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing**
- 2. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan wirausaha**
- 3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat**
- 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**
- 5. Meningkatnya pendapatan masyarakat**
- 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing**
- 7. Meningkatkan kemandirian daerah**
- 8. Menciptakan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel**
- 9. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan harmonis**
- 10. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah**
- 11. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup**
- 12. Mewujudkan pembangunan desa yang merata**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2025 didasari dengan hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dimana ada perubahan pagu anggaran untuk beberapa Perangkat Daerah. Tidak ada perubahan program sampai sub kegiatan dari Perangkat Daerah selain daripada perubahan pagu anggaran.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel perubahan dibawah ini terkait dengan perubahan dan sebelum perubahan:

Tabel 5.1
Perubahan dan Sebelum Perubahan OPD

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN	402.397.824.280,00	382.833.694.824,00	19.564.129.456,00
2	DINAS KESEHATAN	203.235.264.934,00	179.550.402.320,00	23.684.862.614,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	67.307.877.850,00	82.519.336.268,00	(15.211.458.418,00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.578.570.741,25	62.185.376.669,00	38.393.194.072,25
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	6.028.722.033,27	6.530.578.707,00	(501.856.673,73)
6	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	14.452.294.982,48	16.021.901.941,00	(1.569.606.958,52)
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.744.800.802,05	5.306.298.466,00	(561.497.663,95)
8	DINAS SOSIAL	3.745.802.960,90	4.429.159.122,40	(683.356.161,50)
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.209.044.557,48	3.470.322.500,00	(261.277.942,52)
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.510.665.872,92	3.455.328.330,00	(944.662.457,08)
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.974.923.763,92	13.838.945.951,00	(4.864.022.187,08)
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.084.225.077,77	6.593.261.986,00	(1.509.036.908,23)
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.571.442.302,32	5.926.494.338,00	(355.052.035,68)
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.352.748.720,96	17.134.757.114,00	217.991.606,96
15	DINAS PERHUBUNGAN	4.088.669.202,83	4.638.613.035,00	(549.943.832,17)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.499.407.787,24	7.613.547.914,00	(2.114.140.126,76)
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.909.103.326,79	2.718.734.362,20	(809.631.035,41)

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	3.854.550.149,96	3.542.985.993,00	311.564.156,96
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.796.932.150,00	2.627.891.554,00	(830.959.404,00)
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	2.229.194.678,32	2.424.829.669,00	(195.634.990,68)
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.326.545.225,00	4.312.564.691,00	(986.019.466,00)
22	DINAS PARIWISATA	2.617.966.100,00	3.843.223.257,00	(1.225.257.157,00)
23	DINAS PERTANIAN	10.787.674.303,85	10.570.061.004,00	217.613.299,85
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.772.227.357,10	3.971.751.923,00	(1.199.524.565,90)
25	DINAS KETENAGAKERJAAN	4.027.377.749,95	3.980.485.100,00	46.892.649,95
26	SEKRETARIAT DAERAH	29.951.244.721,49	43.995.871.101,00	(14.044.626.379,51)
27	SEKRETARIAT DPRD	33.861.363.363,99	29.801.023.567,00	4.060.339.796,99
28	BAPPEDA	9.761.218.597,83	6.806.812.512,00	2.954.406.085,83
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	254.025.214.411,00	235.491.042.614,19	18.534.171.796,81
30	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.352.450.808,81	7.299.416.012,00	(1.946.965.203,19)
31	INSPEKTORAT	8.277.398.206,61	8.674.837.563,00	(397.439.356,39)
32	KECAMATAN PANDAN	13.308.237.106,83	14.614.120.721,00	(1.305.883.614,17)
33	KECAMATAN SARUDIK	3.978.152.927,07	4.053.685.640,00	(75.532.712,93)
34	KECAMATAN TUKKA	4.561.652.374,51	4.513.198.911,00	48.453.463,51
35	KECAMATAN BADIRI	2.318.476.381,98	2.690.501.263,00	(372.024.881,02)
36	KECAMATAN PINANGSORI	3.910.742.367,57	3.694.592.139,00	216.150.228,57

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5
37	KECAMATAN LUMUT	1.495.702.191,87	1.423.576.362,00	72.125.829,87
38	KECAMATAN SIBABANGUN	2.100.895.382,69	2.404.330.942,00	(303.435.559,31)
39	KECAMATAN SUKABANGUN	421.441.053,90	985.091.405,00	(563.650.351,10)
40	KECAMATAN TAPIAN NAULI	2.266.524.911,60	2.171.143.451,00	95.381.460,60
41	KECAMATAN SITAHUIS	1.797.474.796,03	1.936.210.270,00	(138.735.473,97)
42	KECAMATAN SORKAM	2.786.163.707,94	2.941.507.731,00	(155.344.023,06)
43	KECAMATAN SORKAM BARAT	1.754.039.770,74	1.909.998.937,30	(155.959.166,56)
44	KECAMATAN KOLANG	2.367.392.790,88	2.298.488.790,00	68.904.000,88
45	KECAMATAN PASARIBU TOBING	779.933.099,35	924.070.184,00	(144.137.084,65)
46	KECAMATAN BARUS	2.088.603.160,73	2.029.510.920,00	59.092.240,73
47	KECAMATAN SOSORGADONG	1.437.128.642,76	1.516.016.058,00	(78.887.415,24)
48	KECAMATAN BARUS UTARA	695.481.673,85	952.419.653,00	(256.937.979,15)
49	KECAMATAN ANDAM DEWI	1.201.757.676,49	1.357.291.510,00	(155.533.833,51)
50	KECAMATAN SIRANDORUNG	1.809.966.451,16	1.824.222.164,00	(14.255.712,84)
51	KECAMATAN MANDUAMAS	2.385.552.586,91	2.046.688.014,00	338.864.572,91
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.396.535.045,05	4.051.365.081,00	345.169.964,05
	TOTAL	1.287.194.601.120	1.232.447.580.554,09	54.747.020.565,91

BAB.VI Penutup

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari RKPD Tahun 2025 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain, baik perencanaan tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Perangkat Daerah (PD). Dalam penyusunannya telah menyelaraskan dengan dokumen yang ada pada tingkatan tersebut. Penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjaga keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RKPD dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan demi terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD dalam menjawab tantangan dan permasalahan tidak hanya ditentukan oleh jajaran pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, oleh karena itu upaya mendorong partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 maupun Perubahan RKPD Tahun 2025, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, produktif, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran pemerintah dan pelayanan umum, menyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, serta Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, perubahan dokumen RKPD Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUA-PPAS Perubahan Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan kedalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Akhirnya Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sector pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, tentu saja sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah atasan (Provinsi dan Pusat). Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.